



**KEPUTUSAN RUSIA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA KOREA
UTARA PASCA RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA BANGSA (PBB) NOMOR 2397**

*RUSSIA'S DECISION TO REMAIN HIRING NORTH KOREAN LABOR SINCE
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION NUMBER 2397*

SKRIPSI

Oleh

Mella Anggia Sari

NIM 150910101010

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**KEPUTUSAN RUSIA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA KOREA
UTARA PASCA RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA BANGSA (PBB) NO.2397**

*RUSSIA'S DECISION TO REMAIN HIRING NORTH KOREAN LABOR SINCE
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONNUMBER 2397*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Mella Anggia Sari

NIM 150910101010

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Suyik, Ibu Suntatik dan Ibu Anis Roha yang tersayang;
2. Kakek Dasuki dan Nenek Komina yang kucinta;
3. Adik-adikku, Sandra Enjelia, Reyhan Firdausi dan Bramasta Kurniawan Sanjaya. Semoga kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi sesama;
4. Seluruh guru dan pengajar yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga semua amal baik dibalas oleh Allah SWT;
5. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (terjemahan Surat Al-Insyirah ayat 6-8)^{*)1}

My mission in life is not merely to survive, but to thrive and to do so with some passion, some compassion, some humor and some style.^{**)2}

* Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

** BBC. 2014. *Maya Angelou: In her own words*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-27610770> pada tanggal 1 November 2019.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mella Anggia Sari

NIM : 150910101010

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Rusia Mempekerjakan Tenaga Kerja Korea Utara Pasca Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2019

Yang menyatakan

Mella Anggia Sari
NIM 150910101010

SKRIPSI

**KEPUTUSAN RUSIA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA KOREA
UTARA PASCA RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA BANGSA (PBB) NO.2397**

*RUSSIA'S DECISION TO REMAIN HIRING NORTH KOREAN LABOR SINCE
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL NUMBER 2397*

Oleh

Mella Anggia Sari
NIM 150910101010

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Susilo, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supriyadi, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Keputusan Rusia Mempekerjakan Tenaga Kerja Korea Utara Pasca Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397” telah diuji dan di sahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 30 September 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP 196305261989022001

Anggota I,

Anggota II,

Fuat Albayumi, S.IP., MA
NIP 197404242005011002

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si
NIP 197812242008122001

Mengesahkan

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Keputusan Rusia Mempekerjakan Tenaga Kerja Korea Utara Pasca Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397; Mella Anggia Sari; 150910101010; 64 halaman; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Rusia merupakan sebuah negara yang sangat berperan dalam pendirian Korea Utara. Sejak saat itu Rusia menjadi *partner* dan mitra strategis bagi Korea Utara. Seiring perkembangan zaman, hubungan dan kerja sama diantara kedua negara terus merambah dan meluas ke berbagai bidang seperti ekonomi, kebudayaan dan militer. Sampai suatu saat, Korea Utara tertekan dan terkecam oleh berbagai sanksi yang dikenakan kepada negaranya. Salah satu sanksi yang dikenakan kepada Korea Utara berupa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017 yang berisi larangan penerbitan surat izin kerja di luar negeri bagi warga Korea Utara. Pasca dikeluarkannya resolusi tersebut, pada tahun 2018 Rusia masih tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara dengan mengeluarkan 700 surat izin kerja baru. Oleh karena itu penelitian ini membahas alasan Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara pasca adanya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 2397 tahun 2017.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan konsep kerja sama bilateral, teori fungsionalisme, konsep kebijakan kependudukan dan konsep ketenagakerjaan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari Rusia untuk tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada sanksi berupa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397. Pertama berdasarkan ikatan persahabatan yang dijalin dengan Korea Utara. Kedua karena Rusia mengalami penurunan populasi sehingga membutuhkan tenaga kerja asing.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keputusan Rusia Mempekerjakan Tenaga Kerja Korea Utara Pasca Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kakek Dasuki dan Nenek Komina, terima kasih telah mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan dan kesabarannya selama ini. Kalian menjadi panutan yang luar biasa dalam hidup penulis. Maaf apabila sampai sekarang belum mampu menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan kakek nenek;
2. Bapak Suyik, Ibu Suntatik, Ibu Anis Roha yang telah memberikan kasih sayang, doa dan semangat yang tidak pernah putus. Terima kasih atas segala pembelajarannya;
3. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih telah sabar dan meluangkan banyak waktu demi membimbing penulis;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si selaku dosen pembimbing anggota. Terima kasih untuk segala arahan, bantuan dan semangatnya;
5. Bapak Drs. Abu Bakar Eby Hara MA, Ph. D selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan-arahan kepada penulis terkait permasalahan akademik;
6. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

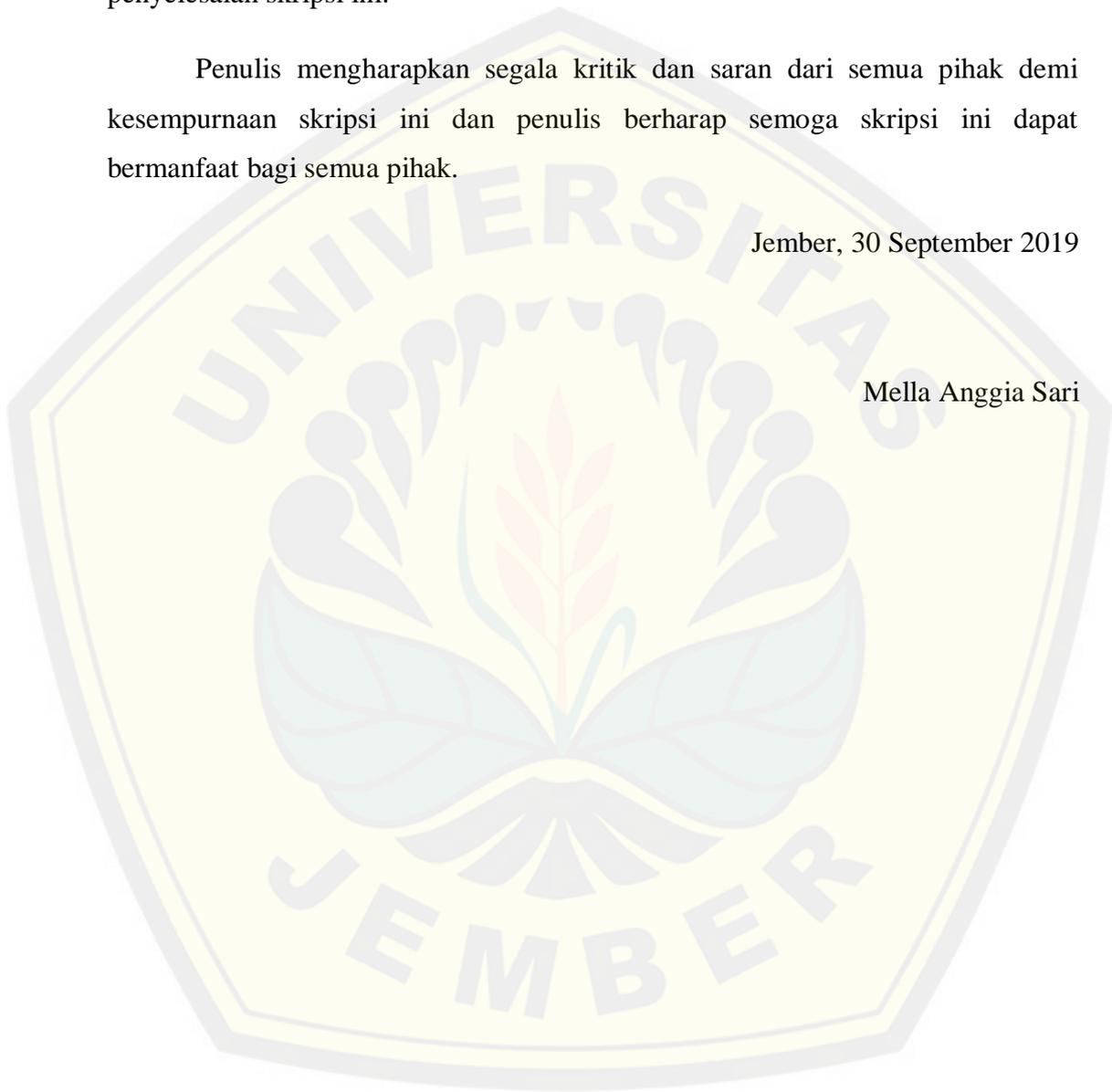
7. Teman-teman HI 2015 yang telah menjadi kawan berjuang di bangku perkuliahan.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 30 September 2019

Mella Anggia Sari



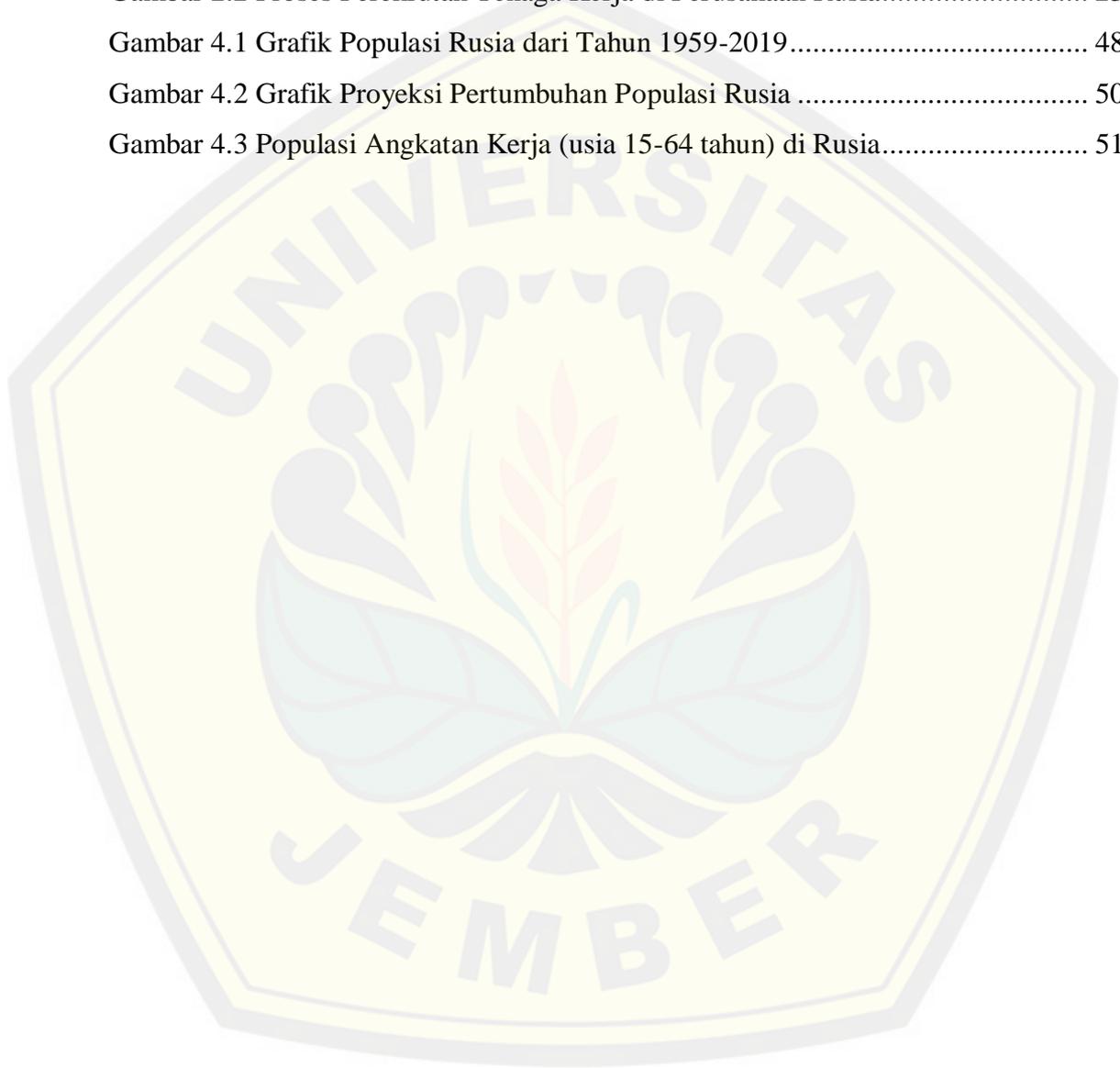
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi.....	4
1.2.2 Batasan Waktu.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kerangka Pemikiran	5
1.5.1 Kerja sama Bilateral	5
1.5.2 Teori Fungsionalisme	8
1.5.3 Kebijakan Kependudukan.....	10
1.5.4 Konsep Ketenagakerjaan	10
1.6 Argumen Utama	12
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	13

1.7.2 Teknik Analisis Data	14
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB 2. GAMBARAN UMUM TENAGA KERJA KOREA UTARA DI RUSIA	16
2.1 Dinamika Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia	16
2.2 Kondisi Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia.....	18
2.3 Sistem Perekrutan Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia	22
BAB 3. RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) NO. 2397 TAHUN 2017	26
3.1 Latar Belakang Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa No.2397 Tahun 2017.....	26
3.2 Isi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB) No.2397 Tahun 2017.....	29
3.3 Respon Rusia dan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2397	36
BAB 4. ALASAN RUSIA TETAP MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA KOREA UTARA PASCA RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) NOMOR 2397 TAHUN 2017 ...	43
4.1 Ikatan Persahabatan	43
4.2 Penurunan Populasi dan Peningkatan Kebutuhan Tenaga Kerja Asing di Rusia.....	46
BAB 5. KESIMPULAN	54
DAFTAR PUSTAKA	55

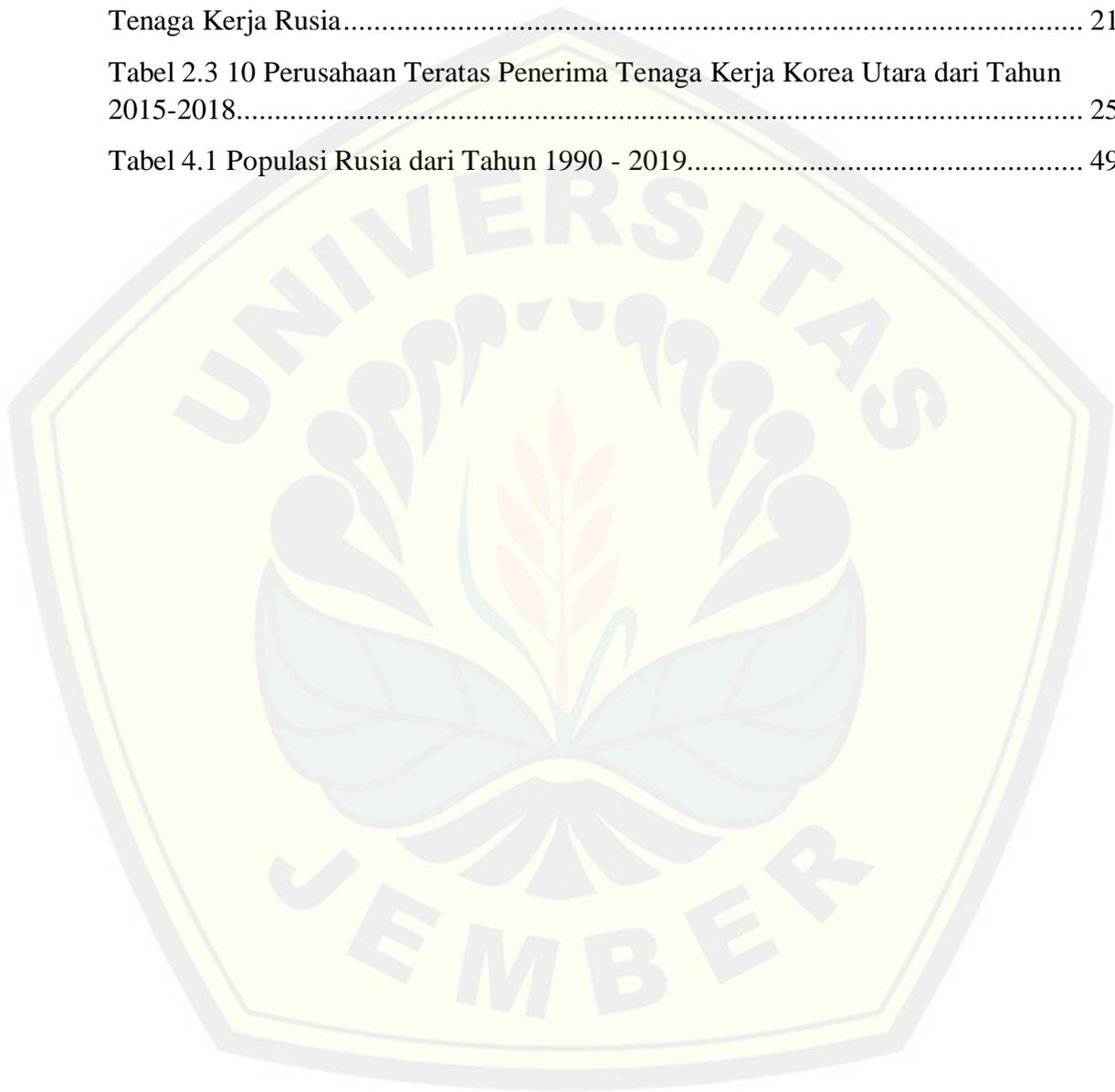
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Daftar Negara dengan Jumlah Tenaga Kerja Korea Utara Terbanyak pada Tahun 2017.....	17
Gambar 2.2 Proses Perekrutan Tenaga Kerja di Perusahaan Rusia.....	23
Gambar 4.1 Grafik Populasi Rusia dari Tahun 1959-2019.....	48
Gambar 4.2 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Populasi Rusia	50
Gambar 4.3 Populasi Angkatan Kerja (usia 15-64 tahun) di Rusia.....	51

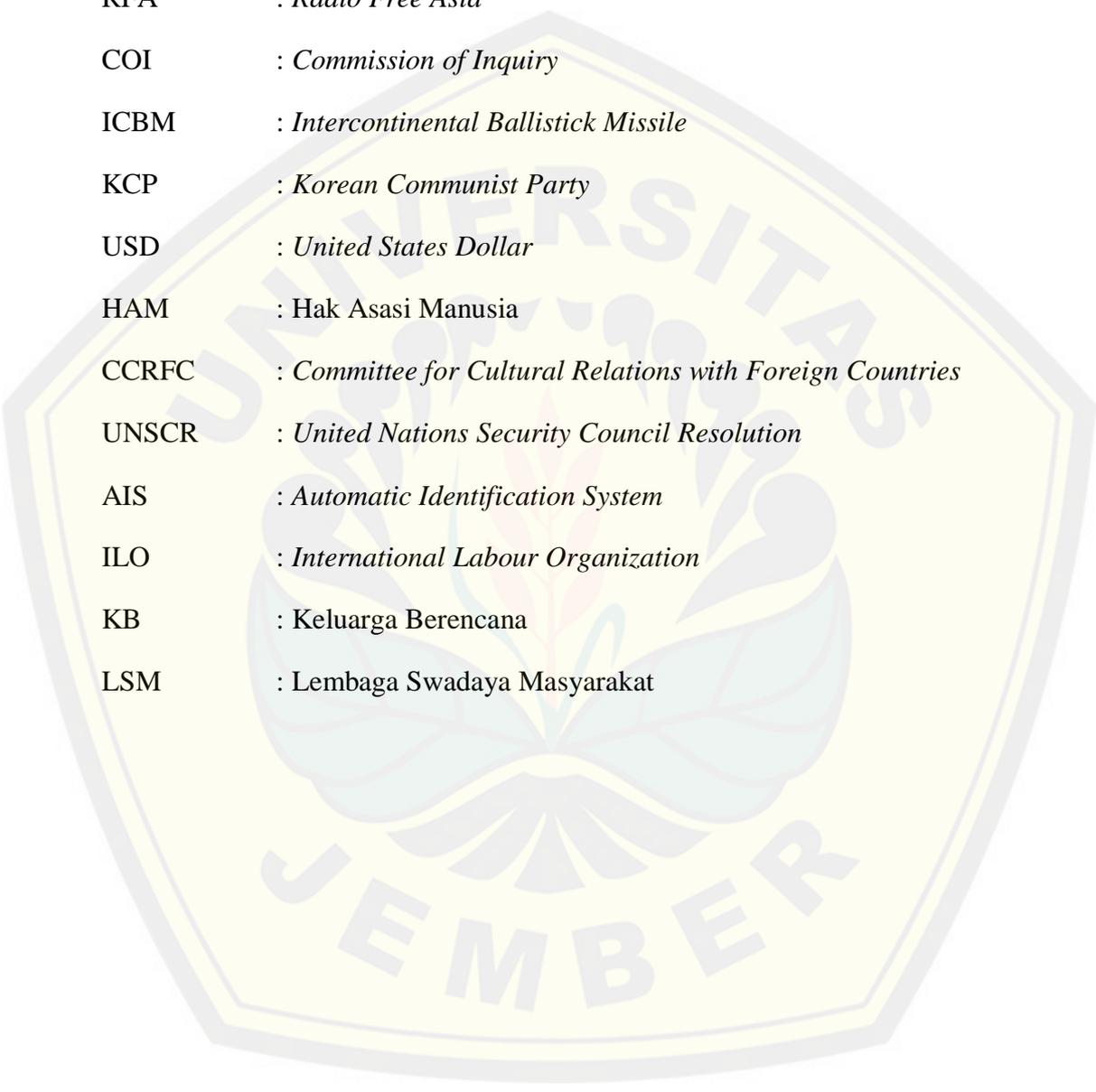


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bidang-Bidang Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja Korea Utara	19
Tabel 2.2 Rata-Rata Jam Kerja Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia dan Jam Kerja Tenaga Kerja Rusia.....	21
Tabel 2.3 10 Perusahaan Teratas Penerima Tenaga Kerja Korea Utara dari Tahun 2015-2018.....	25
Tabel 4.1 Populasi Rusia dari Tahun 1990 - 2019.....	49



DAFTAR SINGKATAN



PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
RFA	: <i>Radio Free Asia</i>
COI	: <i>Commission of Inquiry</i>
ICBM	: <i>Intercontinental Ballistick Missile</i>
KCP	: <i>Korean Communist Party</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
CCRFC	: <i>Committee for Cultural Relations with Foreign Countries</i>
UNSCR	: <i>United Nations Security Council Resolution</i>
AIS	: <i>Automatic Identification System</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KB	: Keluarga Berencana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada studi hubungan internasional, sebuah kepentingan nasional menjadi dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional (Bainus, 2018). Kepentingan nasional menjadi sebuah cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional. Kepentingan nasional tidak akan bisa dijalankan atau dicapai apabila suatu aktor negara tidak memiliki kebijakan dan kekuatan. Kebijakan tersebut merupakan cara, metode, atau alat untuk melakukan dan mencapai kepentingan nasional tersebut. Salah satu contoh kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional adalah dengan cara melakukan suatu hubungan dengan aktor-aktor hubungan internasional baik aktor negara maupun non negara. Sama halnya dengan Rusia, untuk mencapai kepentingan nasionalnya maka melakukan suatu hubungan dengan Korea Utara.

Berdasarkan sejarahnya, awal hubungan antara Rusia dan Korea Utara dimulai sejak akhir Perang Dunia II (Yasinta, 2019). Pada saat Perang Dunia II, Jepang menyatakan kealahannya dengan menyerahkan diri kepada sekutu (Pratama, 2018). Semenanjung Korea sebagai salah satu wilayah kekuasaan Jepang otomatis jatuh kepada tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Semenanjung Korea jatuh kepada Uni Soviet dan Amerika Serikat, kedua negara ini berselisih dalam menentukan wilayah yang berakibat Semenanjung Korea terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian selatan yakni Korea Selatan dibawah naungan Amerika Serikat dan bagian utara yaitu Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet (CNN Indonesia, 2018). Kedua negara ini pertama kali melakukan kerja sama saat perang Korea. Pada saat itu Rusia membantu memasok persenjataan bagi Korea Utara, kemudian pada tahun 1956 kedua negara ini melakukan perjanjian partisipasi kerja sama damai penggunaan nuklir dengan Uni Soviet (Heo dan Woo, 2008: 490). Hal ini adalah cikal bakal pengembangan senjata nuklir di Korea Utara. Seiring perkembangan zaman, lingkup kerja sama antara Rusia

dengan Korea Utara semakin meluas. Korea Utara mampu mengembangkan senjata nuklir dengan berbagai inovasi terbaru yang lebih canggih yang mampu mengancam stabilitas internasional sehingga Korea Utara kerap dikenakan sanksi internasional.

Sanksi-sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Korea Utara menyebabkan negara tersebut mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Menurut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut dapat berdampak negatif karena menghambat sumber penyambung hidup bagi sekitar 13 juta masyarakat Korea Utara (Human Rights Watch, 2018). Banyaknya sanksi internasional yang dikenakan tidak membuat jera Korea Utara untuk tetap mengembangkan senjata nuklirnya. Berdasarkan laporan investigasi Radio Free Asia (RFA) mengungkapkan bahwa Korea Utara mengarahkan rakyatnya bekerja di luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing. Pendapatan mata uang asing tersebut digunakan untuk mengembangkan program senjata nuklirnya (Tempo.co, 2017). Komisi Pemeriksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (COI) tentang hak asasi manusia di Korea Utara juga menyatakan bahwa Korea Utara mengirim para warganya untuk bekerja ke luar negeri dalam rangka menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Korea Utara dengan memberlakukan sistem kerja yang melanggar hak asasi manusia pekerjaannya di luar negeri (United Nations, 2015).

Untuk mengatasi hal tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 22 Desember 2017 mengeluarkan Resolusi No. 2397. Resolusi tersebut bermula atas tindakan peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) oleh Korea Utara pada 29 November 2017. Resolusi tersebut menguatkan resolusi-resolusi sebelumnya dan berisi mengenai embargo perdagangan, embargo persenjataan, pembatasan pengiriman barang, sanksi finansial, sanksi diplomatik dan pelarangan atas penerbitan izin bekerja di luar negeri bagi warga Korea Utara (United Nations, 2017). Pelarangan atas penerbitan izin bekerja di luar negeri bagi warga Korea Utara tertulis pada poin ke-8 Resolusi No.2397 yang berbunyi bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dilarang

menerima para warga korea utara yang dikirim ke luar negeri untuk tujuan menghasilkan pendapatan yang digunakan Korea Utara untuk mendukung program-program nuklir dan rudal balistiknya. Semua warga Korea Utara yang ada di negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus dipulangkan paling lambat 24 bulan setelah diadopsinya resolusi tersebut dan dilarang mengeluarkan surat izin baru (Security Council of United Nations, 2017)

Setelah diadopsinya resolusi tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Nikki Haley selaku utusan Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan bahwa baru-baru ini Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada sanksi yang dikenakan kepada Korea Utara. Sejak Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa No.2397 dikeluarkan, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri Rusia yang ditinjau oleh *Wall Street Journal* menyebutkan bahwa setidaknya 700 izin kerja baru telah dikeluarkan untuk warga Korea Utara pada tahun 2018 menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja Rusia (Talley dan Kurmanae, 2018). Nikki Haley menambahkan bahwa Rusia telah curang meskipun mendukung resolusi tersebut (The Straits Time, 2018). Pada resolusi tersebut sudah jelas tertulis bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa tidak boleh membuka atau menerbitkan izin kerja baru bagi warga Korea Utara dan mengharuskan untuk memulangkan semua warga negara Korea Utara. Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendukung dan menyetujui resolusi tersebut akan tetapi setelah ditetapkannya resolusi tersebut Rusia justru tidak mematuhi dan tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara. Fenomena diatas merupakan suatu fenomena yang sangat menarik dan layak dikaji sehingga membuat penulis tertarik untuk untuk meneliti lebih dalam yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **Keputusan Rusia Mempekerjakan Tenaga Kerja Korea Utara Pasca Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397.**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Aktivitas penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti harus memiliki ruang lingkup pembahasan yang jelas, termasuk meneliti sebuah fenomena hubungan internasional. Ruang lingkup pembahasan perlu dipetakan untuk memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap suatu fenomena dan waktu yang akan diambil. Penentuan ruang lingkup pembahasan perlu difokuskan agar tercipta suatu penelitian yang sistematis, logis dan spesifik pada inti persoalan fenomena yang akan diteliti. Dengan dasar tersebut maka peneliti memberikan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan Materi merupakan suatu batasan terhadap ruang lingkup yang akan diteliti. Batasan materi digunakan dalam menganalisis sebuah penelitian agar materi atau pembahasan yang digunakan dapat menjurus kepada permasalahan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini penulis berfokus kepada alasan Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara pasca adanya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No.2397 tahun 2017.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan rentang waktu yang digunakan penulis dalam meneliti suatu fenomena. Batasan waktu berfungsi untuk menentukan waktu dimulai dan diakhirinya suatu penelitian. Selain itu batasan waktu juga berfungsi sebagai pembatas waktu penelitian agar tercipta suatu penelitian yang terfokus dan terarah.

Batasan waktu yang menjadi rentang waktu pada penelitian ini dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Penentuan batas waktu tersebut dimulai pada tanggal 22 Desember 2017 yaitu sejak dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 2397 sampai bulan April 2019 karena Rusia diketahui tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang (Universitas Jember, 2016: 21). Penentuan rumusan masalah menjadi acuan dan arahan bagi peneliti untuk mengkaji suatu fenomena. Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ***“Mengapa Rusia Tetap Mempekerjakan Tenaga Kerja Dari Korea Utara Pasca Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 Tahun 2017?”***

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah target yang akan dicapai di dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun sudah dikeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerja Sama Bilateral

Konsep kerja sama antar negara merupakan konsep yang menjadi perhatian utama sejak lahirnya studi hubungan internasional. Awalnya kerja sama antar negara ditujukan untuk menciptakan perdamaian dunia (*to build world peace*) atau mencegah terjadinya perang (*to prevent war*). Seiring perkembangan zaman, kini orientasi kerja sama antar negara semakin luas dan berkembang ke dalam berbagai bidang. Semakin banyak interaksi antar negara dalam bentuk kerja sama menjadikan konsep kerja sama sebagai salah satu konsep dasar yang esensial seperti konsep-konsep yang lainnya (Bakry, 2017: 73).

Pengertian dari kerja sama dalam hubungan internasional menurut Robert Keohane adalah suatu interaksi dari para aktor baik aktor negara (*state*) maupun

non negara (*non-state*)³ yang saling menyesuaikan perilaku mereka demi mengarah kepada tujuan bersama yang memberi semua pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan (Keohane, 2006: 81). Kertasasmita mendefinisikan kerja sama internasional sebagai suatu keharusan karena adanya hubungan interdependensi atau saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan dalam bermasyarakat di ranah global (Kertasasmita, 1977: 19). Ada beberapa faktor yang mendorong kerja sama internasional yaitu:

- a. *Security Objectives*, pentingnya menjaga keamanan nasional menjadikan sebuah aktor dalam hubungan internasional melakukan penilaian terhadap aktor-aktor negara maupun non negara yang berpotensi untuk menjadi mitra kerja sama atau saingan;
- b. *Neighborhood*, letak geografis menjadi faktor terbentuknya kerja sama karena kedekatan lokasi atau wilayah akan mempermudah aktor negara (*state*) maupun non negara (*non-state*) dalam melakukan kerja sama;
- c. *Shared Ideals*, merupakan sebuah persamaan mendasar seperti ideologi atau cita-cita yang hendak dicapai bersama. Persamaan ideologi menjadi faktor pendorong karena akan mempermudah dalam melakukan kerja sama daripada dengan aktor-aktor yang bertolak belakang ideologinya;
- d. *Mutual Antagonism*, dalam faktor kali ini kerja sama dibentuk berdasarkan adanya persaingan regional, sejarah dan etnik;
- e. *Matching Interest*, tidak bisa dipungkiri bahwa kesamaan kepentingan yang bertujuan untuk saling menguntungkan satu sama lain menjadi faktor pendorong yang cukup kuat dalam pembentukan sebuah kerja sama internasional;
- f. *Legacy*, adanya warisan seperti sejarah, persamaan budaya, bahasa dan agama;

³ Aktor non-negara terdiri dari perusahaan multinasional (*multinational corporation*), organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organizations*), organisasi non-pemerintah internasional (*international non-governmental organizations*), dan jaringan teroris internasional. Anak Agung Perwira. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya

g. *Momentum*, terbentuknya kerja sama menjadikan nilai positif dan peluang akan perkembangan kerja sama;

h. *Diversity*, perbedaan menjadi salah satu pendorong terbentuknya kerja sama karena dengan adanya perbedaan tersebut akan bisa saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai suatu kepentingan bersama dalam kerja sama (Rana, 2002: 35-36).

Kerja sama dianggap sangat penting bagi hubungan internasional dewasa ini, berikut beberapa poin pentingnya kerja sama internasional:

- 1). Meningkatkan hubungan diantara pihak yang bekerja sama;
- 2). Memenuhi kebutuhan atau kepentingan setiap pihak yang bekerja sama;
- 3.) Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing pihak yang bekerja sama;
- 4). Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia;

Kerja sama yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional dapat berupa kerja sama bilateral, trilateral, multilateral dan regional, namun pada penelitian ini akan dibahas mengenai kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral menurut K.J Holsti merupakan kerja sama yang dijalin oleh dua negara dengan kepentingan masing-masing dalam bidang tertentu dengan tujuan dan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua negara yang bekerja sama akan saling melakukan pendekatan agar dapat menguraikan permasalahan yang diusulkan kemudian membahas bagaimana cara penyelesaian terhadap masalah tersebut yang diakhiri dengan perjanjian yang dapat saling menguntungkan dan memuaskan bagi kedua pihak (Holsti, 1988: 209). Kerja sama bilateral yang dilakukan mencakup berbagai bidang seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan dan lain sebagainya.

Tindakan operasional di dalam setiap kerja sama bilateral selalu dilandasi oleh motif atau alasan tertentu. Pengertian dari motif itu sendiri merupakan

sebuah alasan, dorongan, hasrat, keinginan, penggerak yang ada pada setiap aktor internasional untuk melakukan sesuatu. Motif-motif tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar (Gerungan, 2002: 140).

Motif atau alasan dari masing-masing pihak dapat berbeda atau sama sesuai kebutuhan dan kepentingan dari negaranya. Motif-motif tersebut dapat berupa motif ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Motif ekonomi merupakan sebuah motif atau alasan yang mendorong sebuah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi, motif politik merupakan sebuah alasan atau motif yang didorong oleh keinginan untuk melakukan kerja sama dengan tujuan untuk melakukan intervensi dan mendapat akses sedangkan motif sosial merupakan sebuah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain.

Dengan menggunakan konsep kerja sama bilateral, penulis akan menganalisis apa saja alasan Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara pasca dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017. Pada dasarnya Rusia tidak akan tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara apabila tidak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga dengan menggunakan konsep ini akan membantu penulis dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang diangkat.

1.5.2 Teori Fungsionalisme

Teori ini muncul dari kaum fungsionalis yang mempercayai bahwa dunia ini bukan dunia yang tersutruktur untuk konflik. Konflik memicu perang dan kaum fungsionalis mengatakan bahwa perang merupakan produk tatanan sistem internasional yang keliru. Kaum fungsionalis meyakini bahwa dunia ini dapat diarahkan dan mencapai perdamaian melalui kerja sama yang dibangun atas dasar rasionalisme (Rachmawati, 2012:97). Kerja sama dapat dimulai dari sebuah kerja sama yang sederhana, berawal dari satu kepentingan dan meluas ke kepentingan-kepentingan yang lain. Kerja sama tersebut dapat bermula dari kerja sama-kerja

sama di bidang *low politics* yang nantinya akan bisa berkembang ke dalam *high politics*. Tumbuhnya kerja sama merupakan cita-cita kaum fungsionalis yang mendambakan efek *spill over* dari adanya kerja sama tersebut (Asrudin dan Suryana, 2009: 132).

Menurut Lindberg, *spill over* mengacu pada situasi dimana suatu tindakan diberikan terkait dengan tujuan tertentu akan menciptakan situasi di negara asli dapat dipastikan akan mengambil tindakan lebih lanjut yang membutuhkan lebih banyak aksi dan sebagainya (Coulombis dan Wolfe, 1999: 309). Mitrany meyakini bahwa konsep *spill over* akan menjamin keberlangsungan pertumbuhan seluruh rencana kerja sama dalam aspek ekonomi. Hal ini terjadi berdasarkan kerja sama fungsional awal yang telah memberikan keuntungan atau sebaliknya yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berjalan sehingga merangsang pemerintah untuk memperluas kerja sama pada bidang-bidang yang lain yang dapat menyokong keberhasilan kerja sama fungsional awal. Berikut percontohan bagaimana konsep *spill over*, misalkan ada dua negara menjalin sebuah kerja sama perdagangan tembakau. Ketika kerja sama perdagangan tembakau dirasa cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka kerja sama tersebut akan berlanjut dan merambah ke hal seperti di bidang transportasi, bea cukai, perlindungan buruh dan petani tembakau dan lain sebagainya. Ketika perluasan kerja sama tersebut terkoordinasi dengan baik dan berjalan sukses maka sudah dapat dipastikan bahwa kerja sama akan merambah ke bidang politik (Bakry, 2017: 99).

Penulis menggunakan teori fungsionalisme untuk menganalisis mengapa Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun sudah ada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017. Rusia menerapkan pemikiran kaum fungsionalis yang menganggap bahwa suatu hubungan internasional akan menjamin keteraturan dan perdamaian dunia. Bermula dari hubungan yang bersifat *low politics* dan diharapkan nantinya diharapkan akan berlanjut kepada kerja sama dalam lingkup yang lebih luas. Teori

ini dirasa cocok untuk menganalisis dan membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

1.5.3 Kebijakan Kependudukan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam masalah kependudukan tampak semakin kompleks, khususnya pada saat ini. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti pengendalian jumlah penduduk, penurunan angka fertilitas (kelahiran), peningkatan angka mortalitas (kematian), migrasi penduduk dan lain sebagainya. Seiring dengan kompleksnya permasalahan dalam bidang kependudukan, pemerintah dituntut untuk merancang program-program untuk mengatasi masalah tersebut. Program-program yang didesain untuk mengatasi masalah kependudukan sering disebut dengan kebijakan kependudukan.

Kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan demografi, ekonomi, sosial dan tujuan-tujuan umum lainnya dengan mempengaruhi variabel-variabel utama demografi yakni kelahiran, kematian dan migrasi (Adioetomo dan Samosir, 2010: 261). Kebijakan kependudukan juga didefinisikan sebagai “*government actions-laws, regulations and programs-that try to influence the three agents of population change (births, deaths, and migration) as a way to promote social and economic development,*” (Ashford, 2001).

Kebijakan kependudukan dapat dibedakan antara kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan dan kebijakan yang menanggapi perubahan-perubahan dalam masalah kependudukan. Contoh kebijakan kependudukan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan adalah program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sedangkan contoh kebijakan kependudukan yang menanggapi perubahan-perubahan dalam masalah kependudukan adalah pembukaan lowongan pekerjaan baru seluas-luasnya guna menyerap angkatan kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Perumusan kebijakan kependudukan antar negara berbeda tergantung kondisi demografis masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara wajib merumuskan suatu

kebijakan kependudukan yang tepat berdasarkan masalah kependudukan di masing-masing negara dan kebijakan kependudukan tersebut harus dapat diterapkan dan bisa memperoleh dukungan dari berbagai dari semua pihak seperti warga negaranya sendiri, tokoh-tokoh masyarakat (pemimpin informal), tokoh-tokoh agama dan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Adioetomo dan Samosir, 2010: 261).

Dengan menggunakan konsep kebijakan kependudukan, penulis bertujuan menganalisis kondisi kependudukan di Rusia dan dapat menjelaskan apa alasan Rusia tetap mempekerjakan para tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

1.5.4 Konsep Ketenagakerjaan

Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Badan Pusat Statistik membagi tenaga kerja dalam tiga kelompok:

- 1) Tenaga kerja belum bekerja atau sementara tidak bekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja $0 \geq 1$ jam dalam seminggu. Menurut Payaman Simanjutak, tenaga kerja atau *manpower* adalah tenaga kerja yang mencakup penduduk yang sudah atau sedang berkerja, yang sedang mencari kerja dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir walaupun sedang tidak bekerja dianggap secara fisik mampu dan sewaktu –waktu dapat ikut bekerja.
- 2) Tenaga kerja penuh adalah tenaga yang mempunyai jumlah jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai uraian tugas.
- 3) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu (Darman dan Afiat, 2016).

Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur. Pada tiap-tiap negara mempunyai batasan-batasan

umur tertentu bagi setiap tenaga kerja. Tujuan dari penentuan batas umur ini adalah supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batasan umur yang berbeda-beda karena perbedaan situasi tenaga kerja di masing-masing negara yang berbeda. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Rusia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Darman dan Afiat, 2016).

Angkatan kerja dibedakan menjadi dua yaitu kelompok pekerja dan pengangguran. Pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan (Darman dan Afiat, 2016). Pada tahun 2000 sampai tahun 2002 jumlah populasi angkatan kerja di Rusia menurun. Mulai tahun 2002 hingga tahun 2009 mengalami kenaikan. Puncak kenaikan populasi angkatan kerja di Rusia terjadi pada tahun 2017 dengan perkiraan jumlah 76.656.510 orang. Pada tahun 2018, populasi angkatan kerja Rusia menurun hingga mencapai 75 juta jiwa.

Dengan menggunakan konsep ketenagakerjaan, penulis bertujuan menganalisis kondisi tenaga kerja di Rusia dan menghubungkan apa alasan Rusia tetap mempekerjakan para tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka argumentasi utama mengenai penelitian ini adalah Rusia memiliki 2 alasan mengapa tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada sanksi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017. Pertama karena Rusia memiliki ikatan persahabatan yang erat

dengan Korea Utara. Kedua, karena Rusia mengalami permasalahan penurunan populasi dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja asing.

1.7 Metode Penelitian

Sebuah format penulisan karya ilmiah harus mengandung nilai-nilai ilmiah, sistematis, logis dan sesuai kaidah penelitian. Bobot keilmiahannya suatu karya ilmiah dapat dipenuhi apabila karya tulis tersebut menggunakan metode yang tepat untuk melakukan pengumpulan data-data dan kemudian menganalisis data-data tersebut. Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena (Qudsi, 2011:17). Penelitian kualitatif berusaha untuk mengontruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian kualitatif selalu memperhatikan proses, peristiwa dan autentitas. Metode berkenaan dengan prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional diperoleh. Metode penelitian ini mencakup teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah hal yang paling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dianalisis. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Metode studi literatur tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi lapangan secara langsung untuk mendapatkan data. Data dapat diperoleh dari informasi-informasi yang sudah ada dan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan terhadap fenomena yang akan dianalisis. Data-data tersebut berupa data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Berikut tempat dan sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

1. Tempat

- Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

2. Sumber Literatur

- Buku
- Jurnal Ilmiah
- Surat Kabar atau Koran
- Media Internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik penulisan ini berupaya menggambarkan dan mengkualifikasikan fakta-fakta dengan memberikan data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis apa alasan Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada sanksi internasional berupa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB 1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2. Gambaran Umum Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana kondisi para tenaga kerja dari Korea Utara yang bekerja di Rusia

BAB 3. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 2397 Tahun 2017

Bab ini menjelaskan mengenai sanksi dunia internasional yang dikenakan kepada Korea Utara berupa Resolusi Dewan Keamanan Bangsa Bangsa Nomor 2397 karena resolusi tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara

BAB 4. Alasan Rusia Tetap Mempekerjakan Tenaga Kerja Korea Utara Pasca Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017

Bab ini menjelaskan apa saja alasan Rusia tetap mempekerjakan para tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017.

BAB 5. Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini.

BAB 2. GAMBARAN UMUM TENAGA KERJA KOREA UTARA DI RUSIA

Pada bab sebelumnya, penulis menjelaskan tentang alasan mengambil penelitian yang berjudul Keputusan Rusia Tetap Mempekerjakan Tenaga Kerja Korea Utara Pasca Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum bagaimana tenaga kerja Korea Utara di Rusia yang nantinya membantu penulis dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.

2.1 Dinamika Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia

Rusia adalah salah satu negara tujuan utama bagi para tenaga kerja dari Korea Utara. Rusia bisa menjadi negara tujuan utama para tenaga kerja dari Korea Utara karena faktor hubungan kedekatannya dengan Korea Utara dan faktor geografis yang mendukung (BSI Group, 2017). Tenaga kerja Korea Utara pertama kali datang ke Rusia (saat itu masih Uni Soviet) pada akhir 1940-an di bawah perjanjian antar pemerintah yang dihadiri oleh kedua pemimpin negara yakni Kim Il Sung dan Joseph Stalin. Perjanjian tersebut berisi bahwa Korea Utara harus menyediakan ribuan warga negaranya untuk bekerja di Rusia baik secara sukarela ataupun secara paksa (Zabrovskaya, 2006).

Sejak awal perjanjian sampai saat ini terjadi peningkatan jumlah pekerja Korea Utara di Rusia. Sejak akhir 1960-an hingga awal 1990-an terdapat sekitar 15.000-20.000 pekerja Korea Utara yang ada di Rusia (Lankov, 2017). Pada tahun 2010 ada sekitar 21.000 pekerja Korea Utara. Pada tahun 2013, Rusia menaikkan kuota tenaga kerja menjadi 35.000 pekerja. Pada 2015 sudah ada sekitar 47.364 pekerja Korea Utara yang diberi wewenang untuk bekerja di Rusia menurut Kementerian Tenaga Kerja (Zakharova, 2016). Pada tahun 2017, kurang lebih terdapat 50.000 pekerja Korea Utara berada di Rusia (Lukin dan Zakharova, 2017). Permintaan terhadap pekerja dari Korea Utara ke Rusia setiap tahun

cenderung meningkat mengingat penurunan populasi Rusia (International Crisis Group, 2007). Berikut gambar data teratas negara dengan jumlah tenaga kerja dari Korea Utara pada tahun 2017:



Gambar 2.1 Daftar Negara dengan Jumlah Tenaga Kerja Korea Utara Terbanyak Pada Tahun 2017

Sumber: BSI Group. 2017. *North Korean Labor in International Supply Chains*. Diakses dari <https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/es-mx/supply-chain-solutions/north-korean-forced-labor-1711.pdf> pada tanggal 16 Oktober 2019.

Pada gambar diatas, dapat diketahui bahwa Rusia menduduki tempat pertama sebagai negara dengan jumlah total terbanyak para tenaga kerja dari Korea Utara pada tahun 2017. Jumlah tenaga kerja dari Korea Utara di Rusia pada tahun 2017 mencapai 50.000 orang. Posisi kedua ditempati oleh Cina dengan jumlah sampai 30.000 tenaga kerja Korea Utara. Posisi ketiga disusul oleh Kuwait dengan jumlah 3.000 tenaga kerja, selanjutnya Qatar dengan jumlah 1000 tenaga kerja dan yang terakhir di Polandia dengan jumlah tenaga kerja dari Korea Utara sekitar 400-500 orang.

2.2 Kondisi Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia

Para tenaga kerja Korea Utara yang bekerja di Rusia umumnya bekerja di berbagai bidang yang tersebar di seluruh penjuru Rusia. Pada masa Uni Soviet, para tenaga kerja dari Korea Utara mayoritas bekerja di industri kayu dan terpusat di daerah-daerah terpencil seperti Gulag di hutan belantara di Siberia (Lukin dan Zakharova, 2017). Gulag atau *Glavnoye Upravleniye Ispravitelno-trudovykh Lagrey i Kolonii* adalah kamp kerja yang dibuat di bawah pemerintahan diktator Soviet, Joseph Stalin. Gulag digunakan untuk menampung jutaan orang yang dieksploitasi untuk kerja paksa (Pradana, 2019). Saat ini 70% tenaga kerja dari Korea Utara di Rusia dipekerjakan di bidang konstruksi, perikanan, pertanian, penebangan, restoran dan lain sebagainya. Para tenaga kerja dari Korea Utara saat ini tersebar di kota-kota di seluruh wilayah Rusia seperti Saint Petersburg, Moskow, Tatarstan, Makhachkala, Irkutsk, Krasnoyarsk, Dagestan, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Oblast Omsk, Oblast Novosibirsk, Krai, Khabarovsk, Krai Primorsky dan beberapa kota lainnya (Gyupchanova, 2018).

Umumnya para tenaga kerja Korea Utara yang bekerja di Rusia didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut dikarenakan rata-rata lowongan pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja Korea Utara membutuhkan tuntunan fisik yang kuat sehingga membutuhkan tenaga kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan tenaga kerja perempuan. Berikut daftar bidang pekerjaan di Korea Utara beserta persentasenya:

Tabel 2.1 Bidang-Bidang Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia

Economic activity	Total	Males	Females
Agriculture	0,7	0,8	0,5
Mining and quarrying	0,1	0,2	0
Manufacturing	3,8	4,4	2,3
Electricity, gas and water supply	1,0	1,3	0,1
Construction	22,7	30,4	2,5
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods	36,4	30,0	53,3
Hotels and restaurants	6,3	4,0	12,5
Transport and communications	8,2	9,8	3,9
Financial intermediation	0,3	0,1	0,8
Real estate, renting and business activities	0,2	0,1	0,4
Public administration, compulsory social security	0,2	0,2	0,2
Education	0,5	0,2	1,2
Health and social work	0,7	0,5	1,3
Other community, social and personal service activities	13,2	13,7	11,8
Services for the household	1,3	0,4	3,6
Other	4,2	3,7	5,4

Sumber: Mikhail Denisenko. 2013. Migrants at the Russian Labour Market: Characteristics, Status, Mobility. Diakses dari http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/07/WP_3_21.pdf pada tanggal 16 Oktober 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dimaknai bahwa ada beberapa bidang pekerjaan bagi tenaga kerja dari Korea Utara di Rusia. Bidang pekerjaan tersebut meliputi bidang pertanian, penggalian, penambangan, manufaktur, pemasokan gas, air dan listrik, konstruksi, perdagangan grosir, ritel, perhotelan, restoran, perantara keuangan, bisnis tanah, administrasi publik, pendidikan, kesehatan, kerja sosial, pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya. Tenaga kerja dari Korea Utara di Rusia paling banyak bekerja di bidang grosir dan ritel seperti memperbaiki motor dan barang-barang rumah tangga. Presentase pekerjaan di bidang grosir dan ritel mencapai 36,4% lalu disusul oleh bidang konstruksi dengan 22,7%, pekerjaan dengan presentase paling rendah yakni di bidang penggalian dan penambangan dengan 0,2%. Pada tabel diatas juga disertakan presentase pekerja laki-laki dan perempuan di masing-masing bidang pekerjaan. Tenaga kerja laki-laki dari Korea Utara kebanyakan bekerja di bidang perdagangan dan konstruksi,

sedangkan bagi tenaga kerja perempuan mayoritas di perdagangan, restoran dan perhotelan.

Para *stakeholder* di Rusia mengakui bahwa etos kerja para pekerja dari Korea Utara sangat bagus. Rusia merasa nyaman mempekerjakan para tenaga kerja dari Korea Utara karena ketekunan, kedisiplinan dan daya saing gaji mereka (Zakharova, 2016). Seorang eksekutif perusahaan *real estate* di St. Petersburg menyatakan bahwa para pekerja dari Korea Utara seperti tentara, mereka sangat disiplin dan ia ingin terus bekerja dengan mereka kedepannya (Talley dan Kurmanaev, 2018). Mayoritas pengusaha di Rusia memandang pekerja dari Korea Utara merupakan pekerja terbaik dibandingkan pekerja dari negara-negara lainnya. Para pekerja Korea Utara sangat rajin, bertanggung jawab, pekerja keras, mau bekerja lembur dan rela melewatkan hari libur untuk menyelesaikan proyek sesegara mungkin. Jika dinilai dari A-E maka para pekerja dari Korea Utara mendapat nilai A+ dari mayoritas perusahaan di Rusia (Lankov, 2018). Berikut tabel jam kerja tenaga kerja Korea Utara di Rusia:

Tabel 2.2 Rata-Rata Jam Kerja Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia dan Jam Kerja Tenaga Kerja Rusia

Economic activity *	Respondents		Russian workers **		Working time of respondents to working time of Russian workers (working time of Russian workers = 100%)	
	working week	working day	working week	working day	working week	working day
Manufacturing	53,5	9,85	44,7	9,61	120	102
Electricity, gas and water supply	49,2	8,43	н/д	н/д
Construction	59,5	9,81	48,5	9,09	123	108
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods	65,0	10,31	45,5	9,51	143	108
Hotels and restaurants	63,4	11,11	н/д	н/д
Transport and communications	58,9	11,13	46,0	9,98	128	112
Other community, social and personal service activities	58,5	9,62	42,3	9,52	138	102
Services for the household	66,4	11,19	н/д	н/д
Total	61,1	10,18	43,8	9,43	139	108

Sumber: Mikhail Denisenko. 2013. Migrants at the Russian Labour Market: Characteristics, Status, Mobility. Diakses dari http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/07/WP_3_21.pdf pada tanggal 16 Oktober 2019.

Pada tabel diatas tertulis mengenai rata-rata jam kerja antara tenaga kerja Korea Utara dan tenaga kerja Rusia di masing-masing bidang pekerjaan. Total rata-rata jam kerja per hari dan per minggu tenaga kerja Korea Utara di Rusia lebih lama dibandingkan dengan rata-rata jam kerja tenaga kerja asli Rusia. Rata-rata jam kerja per hari tenaga kerja Korea Utara selama 10,18 jam sedangkan jam kerja per hari tenaga kerja Rusia selama 9,43 jam. Apabila dihitung rata-rata jam kerja per minggu, maka total jam kerja tenaga kerja Korea Utara di Rusia selama 66,4 jam. Rata-rata jumlah jam kerja per minggu tenaga kerja Rusia lebih sedikit dari pada

tenaga kerja Korea Utara yakni selama 43,8. Hal tersebut yang membuat para *stakeholder* di Rusia menyukai kinerja para tenaga kerja dari Korea Utara.

Selain karena kinerjanya, Rusia menyukai para tenaga kerja dari Korea Utara karena mau dibayar dengan harga yang terjangkau. Menurut Kementerian Tenaga Kerja Rusia, para pekerja dari Korea Utara mendapatkan gaji rata-rata 415 USD sebulan per pekerja. Gaji tersebut 40% lebih rendah dari gaji rata-rata di Rusia. Kementerian Tenaga Kerja Rusia tidak memberikan gaji secara langsung kepada tenaga kerja dari Korea Utara melainkan melewati tempat atau biro tenaga kerja tersebut (Napalkova, 2019). Intensitas kerja yang tinggi, etos kerja yang mumpuni serta upah kerja yang terjangkau membuat tenaga kerja Korea Utara menjadi tenaga kerja asing yang sangat disukai dan dicari oleh para pengusaha dan pemerintah di Rusia.

2.3 Sistem Perekrutan Tenaga Kerja Korea Utara di Rusia

Rusia memiliki sistem perekrutan dalam menerima tenaga kerja asing salah satunya perekrutan mengenai tenaga kerja dari Korea Utara. Terdapat beberapa aktor yang berperan dalam proses perekrutan tenaga kerja Korea Utara di Rusia. Aktor-aktor tersebut adalah pemerintah Federasi Rusia yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja Rusia dan beberapa badan hukum yang terdiri dari berbagai jaringan perusahaan. Berikut gambar sistem perekrutan tenaga kerja di Rusia:



Gambar 2.2 Proses Perekrutan Tenaga Kerja di Perusahaan Rusia

Sumber: Jason Asterburn, 2018. *DISPATCHED: Mapping Overseas Forced Labor in North Korea's Poliferation Finance System*. Diakses dari <https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=c978f6580e304a698e52c9f6271906b0&classicembedmode> pada 17 Agustus 2019.

Pada gambar diatas tertera proses perekrutan untuk tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Proses pertukaran untuk tenaga kerja asing dan lokal berbeda, ada 3 proses perekrutan untuk tenaga kerja asing termasuk tenaga kerja dari Korea Utara yaitu:

1. Mengirim aplikasi visa ke kantor kota. Calon tenaga kerja Korea Utara yang hendak bekerja di Rusia diwajibkan mengurus beberapa persyaratan termasuk visa. Pengurusan visa untuk tenaga kerja dari Korea Utara diurus oleh manajer atau bagian administrasi perusahaan yang merekrutnya, selanjutnya manajer atau bagian administrasi perusahaan tersebut akan mengirim aplikasi visa tersebut. Rusia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai tenaga kerja asing, undang-undang tersebut menetapkan dan memberi wewenang kepada Kementerian Tenaga Kerja Rusia untuk memberi izin dan menerbitkan visa bagi tenaga kerja asing termasuk dari Korea Utara. Kementerian Tenaga Kerja Rusia

juga memberikan otorisasi kepada perusahaan-perusahaan untuk merekrut tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja Korea Utara saat ini yang berada di Rusia di bawah kendali perusahaan yang merekrutnya. Perusahaan tersebut mengirim aplikasi visa kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk diterbitkan visa kerjanya.

2. Menerima visa dari organisasi administrasi perwakilan. Setelah proses pengiriman aplikasi visa maka calon tenaga kerja dari Korea Utara mendapatkan visa yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Rusia.

3. Memulai untuk bekerja. Setelah semua proses mengenai perizinan bekerja sudah terpenuhi maka selanjutnya para tenaga kerja asing sudah bisa memulai kerja di Rusia.

Berdasarkan gambar proses perekrutan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perekrutan tenaga kerja asing di Rusia, termasuk tenaga kerja dari Korea Utara harus melalui perusahaan perekrutan dan Kementerian Tenaga Kerja Rusia. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai peranan yang besar dalam penyediaan tenaga kerja Korea Utara bagi Rusia. Rusia memiliki perusahaan perekrutan yang jumlahnya mencapai 450 perusahaan. Berikut daftar perusahaan dengan penerima tenaga kerja Korea Utara terbanyak selama tahun 2015 hingga tahun 2018:

Tabel 2.3 10 Perusahaan Teratas Penerima Tenaga Kerja Korea Utara dari tahun 2015 hingga tahun 2018

Russian Name	English Transliteration	Tax ID Number	Total Authorizations Received for North Korean Workers (2015–2018)	Nationality of Owners
ООО "ЧХОЛСАИ"	Cholson LLC	5405284511	1,941	DPRK (100%)
ООО ТСК "ЧХОЛСАИ"	Cholson CCC	2721104810	1,839	DPRK (100%)
ООО КФ ГВО "РЫНРАДО"	Rynrado GTC	2460052058	1,805	China
ООО "РЫНРАДО"	Rynrado LLC	2722040599	1,701	DPRK (100%)
ООО "РЫНРАДО"	Rynrado LLC	2536133334	1,600	Unknown, previously Vietnam
ООО "ЕНИСЕЙ"	Enisei LLC	2466210127	1,592	Korea
ООО "ЗЕНКО-39"	Zenko-39 LLC	2308160794	1,550	China
ООО "РЫНРАДО"	Rynrado LLC	5401212192	1,322	DPRK (50%)
ООО "СпецРемСтрой"	SpetcRemStroi LLC	1659102616	1,250	DPRK (100%)
ООО "СТРОИТЕЛИ-7"	Stroiteli-7 LLC	0276089944	1,248	Unknown, previously DPRK

Sumber: Jason Asterburn, 2018. *DISPATCHED: Mapping Overseas Forced Labor in North Korea's Poliferation Finance System*. Diakses dari <https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=c978f6580e304a698e52c9f6271906b0&classicembedmode> pada 17 Agustus 2019.

Tabel diatas berisi mengenai 10 perusahaan dengan jumlah penerima tenaga kerja Korea Utara terbanyak di Rusia. Perusahaan yang menduduki peringkat pertama diraih oleh Cholson LLC dengan jumlah 1.941 tenaga kerja. Perusahaan Cholson tersebut merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dari Korea Utara di Rusia. Berdasarkan tabel diatas juga bisa diketahui bahwa pemilik perusahaan tidak hanya berasal dari Rusia, beberapa perusahaan ada yang dimiliki oleh orang Korea Utara, Cina, Vietnam.

BAB 3. RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) NO. 2397 TAHUN 2017

Pada bab ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai sanksi yang dikenakan kepada Korea Utara berupa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa No.2397. Pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa No.2397 terdapat poin yang menjelaskan mengenai larangan pengiriman warga negara Korea Utara ke luar negeri. Penjelasan mengenai resolusi tersebut ditujukan untuk menunjang penulis dalam melakukan penelitian pada karya tulis ini guna mencari apa alasan atau kepentingan Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun sudah ada resolusi tersebut.

3.1 Latar Belakang Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa No.2397 Tahun 2017

Sejak terpilihnya Kim Jong Un menjadi penguasa tertinggi Korea Utara, ia menerapkan berbagai kebijakan salah satunya strategi lima tahun untuk pembangunan ekonomi Korea Utara. Strategi tersebut berisi kiat-kiat usaha yang dilakukan Korea Utara untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Salah satu usaha Korea Utara untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut dengan tetap mengembangkan senjata nuklir dan berulang-ulang melakukan peluncuran rudal (Human Rights Council of United Nations, 2017). Alasan Korea Utara tetap mengembangkan nuklir sampai saat ini adalah sebagai mekanisme pertahanan diri karena bercermin dari invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Pada masa awal pemerintahan Kim Jong Un sampai tahun 2017 sudah tercatat 13 kali usaha peluncuran rudal balistik yakni sekali pada tahun 2012, dua kali pada tahun 2015, 6 kali selama 2016 dan 4 kali sepanjang 2017. Pada tahun 2016 merupakan masa uji coba peluncuran uji nuklir terbanyak selama ini. (Hasan, 2018). Peluncuran rudal balistik yang berulang tidak hanya meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea atau Asia Timur tapi juga sangat menggegerkan dunia internasional.

Korea Utara sendiri sebenarnya sudah mendapatkan berbagai kecaman dan sanksi internasional sejak awal pendirian senjata nuklir akan tetapi banyaknya sanksi internasional yang dikenakan tidak membuat jera Korea Utara untuk tetap mengembangkan senjata nuklirnya. Berdasarkan laporan investigasi Radio Free Asia (RFA) mengungkapkan bahwa seiring Korea Utara mengembangkan senjata nuklir ternyata negara tersebut juga mengarahkan rakyatnya bekerja di luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing. Pendapatan mata uang asing tersebut digunakan untuk mengembangkan program senjata nuklirnya (Tempo.co, 2017). Komisi Pemeriksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (COI) tentang hak asasi manusia di Korea Utara juga menyatakan bahwa Korea Utara mengirim para warganya untuk bekerja ke luar negeri dalam rangka menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Korea Utara (United Nations, 2015).

Umumnya para pekerja diperkerjakan di perusahaan konstruksi, pertambangan, tekstil dan lain sebagainya. Sistem kerja yang diberlakukan Korea Utara melanggar hak asasi manusia para pekerjanya terkait dengan gaji, jam kerja, tempat tinggal, dan perlindungan selama di luar negeri. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa Bangsa A/70/362 tanggal 8 September 2015 menyatakan berikut kondisi para pekerja Korea Utara di luar negeri:

- a. Para pekerja tidak mengetahui rincian kontrak mereka;
- b. Pekerjaan ditugaskan sesuai kelas sosial mereka(songbun): kelas bawah melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Para pekerja yang memiliki hubungan kekerabatan di negara lebih disukai untuk memastikan bahwa mereka akan patuh selama di luar negeri;
- c. Pekerja mendapatkan upah rata-rata sekitar 120-150 USD/bulan, faktanya para majikan mengirim jumlah yang lebih besar kepada pemerintah Korea Utara (para majikan menyetorkan gaji pekerja ke rekening yang dikendalikan oleh perusahaan Korea Utara);
- d. Para pekerja dipaksa bekerja hingga 20 jam per hari, hanya dengan jatah istirahat 1-2 hari sebulan. Dalam beberapa kasus apabila para pekerja tidak

mencapai atau memenuhi kuota bulanan yang diberlakukan maka mereka tidak dibayar;

- e. Tindakan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja kurang memadai. Apabila terjadi kecelakaan tidak dilaporkan kepada pihak berwenang setempat akan tetapi ditangani oleh agen keamanan;
- f. Para pekerja tidak mendapat jatah makanan yang cukup setiap hari. Kebebasan bergerak para pekerja di luar negeri sangat terbatas. Pekerja berada dibawah pengawasan oleh personel keamanan secara terus menerus untuk memastikan bahwa para pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan dari pemerintah. Para agen tersebut menyita para paspor pekerja dan melarang para pekerja untuk kembali ke Korea Utara selama masa penugasan;
- g. Pekerja terancam dipulangkan dan dilaporkan kepada pemerintah Korea Utara apabila tidak melakukan tugas dengan baik atau melakukan pelanggaran.

Pada laporan Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB) diatas juga tertulis bahwa ada sekitar 50.000 pekerja Korea Utara yang bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang diperoleh sekitar 1,2 - 2.3 miliar USD per tahun. Sebagian besar pekerja Korea Utara ada di Cina dan Rusia. Ada juga laporan mengenai daftar negara lain yang terdapat pekerja dari Korea Utara yaitu di Aljazair, Angola, Kamboja, Republik Guinea Katulistiwa, Ethiopia, Kuwait, Libya, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Oman, Polandia, Qatar, dan Uni Emirat Arab (United Nation, 2015).

Pengembangan senjata nuklir dan pengiriman para warga negaranya yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan sanksi internasional lainnya sehingga membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperketat sanksi terhadap Korea Utara dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamana Perserikatan Bangsa Bangsa No. 2397 pada tanggal 22 Desember 2017 (Human Rights Council of United Nations, 2017). Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan

Bangsa Bangsa (PBB) No.2397 merupakan resolusi yang relevan dengan resolusi-resolusi sebelumnya seperti resolusi 825 tahun 1993, resolusi 1695 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 1887 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017 dan resolusi 2375 tahun 2017. Resolusi No. 2397 ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena pada resolusi ini ditekankan poin-poin yang lebih tegas dan mengikat, selain itu pada resolusi ini tidak hanya dibahas mengenai uji nuklir akan tetapi juga menyentuh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintahan Korea Utara serta berisi mengenai embargo perdagangan, embargo persenjataan, pembatasan pengiriman barang, sanksi finansial, sanksi diplomatik dan memperketat kemampuan Korea Utara untuk mengirim warga negaranya bekerja di luar negeri (Security Council of United Nations, 2017).

3.2 Isi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB) No.2397 Tahun 2017

Berikut isi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2397:

- 1). Mengecam peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara pada 28 November 2017 yang mengabaikan dan melanggar resolusi dewan keamanan sebelumnya:
- 2). Menegaskan kembali tentang keputusan bahwa Korea Utara tidak akan melakukan peluncuran rudal balistik, uji nuklir dan provokasi lainnya; Korea Utara harus segera menanggihkan semua kegiatannya yang berkaitan dengan program rudal balistiknya; harus segera meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir yang masih ada;
- 3). Memutuskan bahwa langkah-langkah yang ditentukan dalam paragraf 8 resolusi 1718 tahun 2016 berlaku juga untuk individu dan entitas yang tercantum dalam lampiran I dan II di resolusi ini;

4). Memutuskan bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus melarang pasokan, penjualan secara langsung dan tidak langsung ke Korea Utara baik melalui wilayah mereka atau oleh warga negara mereka, atau menggunakan kapal, pesawat terbang, saluran pipa, jalur kereta api, atau kendaraan lainnya. Terdapat pengecualian bagi minyak mentah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Korea Utara akan tetapi harus mendapatkan izin dari komite terlebih dahulu. Pengiriman minyak mentah hanya diperbolehkan sebesar 4 juta barel atau 525.000 ton per tahunnya. Selain itu bagi negara yang menyediakan minyak mentah bagi Korea Utara wajib membuat laporan yang harus diserahkan kepada Komite setiap 90 hari sekali sejak tanggal resolusi ini;

5). Memutuskan bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus melarang pasokan, penjualan secara langsung dan tidak langsung ke Korea Utara baik melalui wilayah mereka atau oleh warga negara mereka, atau menggunakan kapal, pesawat terbang, saluran pipa, jalur kereta api, atau kendaraan lainnya berupa minyak olahan. Terdapat pengecualian bagi minyak olahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Korea Utara akan tetapi harus mendapatkan izin dari komite terlebih dahulu. Pengiriman minyak mentah hanya diperbolehkan sebesar 500.000 barel per tahun sejak tanggal 1 Januari 2018. Selain itu bagi negara yang menyediakan minyak olahan bagi Korea Utara wajib membuat laporan yang harus diserahkan kepada Komite setiap 30 hari sekali sejak tanggal resolusi ini yang berisi jumlah pasokan yang dikirimkan dan semua pihak yang bertransaksi. Sekretaris Komite juga diwajibkan untuk memberi tahu semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) apabila penjualan minyak olahan ke Korea Utara sudah mencapai 75%, 90% dan 95% dari batas yang ditetapkan. Sekretaris harus memberikan informasi yang *up to date* dan semua negara anggota harus sering-sering melihat informasi yang telah diberikan oleh sekretaris komite;

6). Memutuskan bahwa Korea Utara tidak boleh memasok, menjual, mentransfer apapun baik secara langsung dan tidak langsung baik melalui wilayah mereka atau warga negara mereka berupa produk pertanian, peralatan listrik, tanah dan batu termasuk magnesium dan magnesit, dan kayu menggunakan kapal, pesawat dan

lain sebagainya. Kepada semua negara harus melarang warga negaranya untuk melakukan, membeli dan menerima pasokan barang-barang yang telah dijelaskan diatas;

7). Memutuskan bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dilarang untuk menjual, memasok, mentransfer baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Korea Utara berupa barang-barang seperti mesin industri, kendaraan transportasi, besi baja, dan logal lainnya. Ketentuan ini tidak berlaku sehubungan dengan pengiriman penyediaan suku cadang pesawat sipil Korea Utara;

8). Menyatakan kekhawatiran bahwa warga negara Korea Utara yang bekerja di negara-negara lain untuk tujuan menghasilkan pendapatan asing yang digunakan Korea Utara untuk mendukung program rudal nuklir dan balistiknya yang terlarang. Mengadopsi dari paragraf ke-17 resolusi 2375 menyatakan bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) wajib memulangkan semua warga negara Korea Utara yang bekerja di wilayah yurisdiksinya tidak lebih 24 bulan sejak tanggal diadopsinya resolusi ini. Dua belas bulan sejak pengadopsian resolusi ini, semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diharuskan membuat dan memberikan laporan terkait warga negara Korea Utara yang bekerja di negara masing-masing. Selain itu juga diharuskan membuat dan memberikan laporan akhir terkait warga negara Korea Utara yang bekerja di negara masing-masing maksimal 27 bulan sejak resolusi ini diadopsi;

9). Catatan dengan keprihatinan besar bahwa Korea Utara secara ilegal mengeksport batu bara dan barang-barang lainnya melalui praktik kelautan yang menipu sehingga memperoleh minyak secara ilegal melalui transfer antar kapal. Oleh sebab itu memutuskan semua negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memeriksa dan menyita kapal Korea Utara yang melakukan tindakan ilegal tersebut;

10). Memutuskan bahwa apabila terdapat satu negara yang mendengar atau memiliki informasi mengenai kecurigaan bahwa Korea Utara akan melakukan

pemasokan atau pengiriman barang-barang baik secara langsung maupun tidak langsung maka negara anggota tersebut boleh melapor dan mendapatkan informasi kelautan serta bisa meminta informasi dari negara-negara yang lain. Negara-negara lain yang dimintai informasi harus segera tanggap merespon;

11). Menegaskan kembali tentang paragraf 22 pada resolusi 2321 tahun 2016 dan memutuskan bahwa setiap negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus melarang warga negaranya atau orang yang tunduk pada yurisdiksinya atau entitas yang tergabung dalam wilayahnya untuk tidak menyediakan layanan asuransi atau re-asuransi bagi kapal kepemilikannya. Alasannya karena mengantisipasi adanya kegiatan yang terlibat dalam pengangkutan barang yang dilarang oleh resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini. Terdapat pengecualian dari komite apabila kapal yang terlibat tidak dalam tujuan khusus tidak untuk menghasilkan pendapatan bagi Korea Utara melaiikan utuk tujuan kemanusiaan;

12). Menegaskan kembali tentang paragraf 24 pada resolusi 2321 tahun 2016 dan memutuskan bahwa setiap negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus membatalkan registrasi kapal yang diduga dan dipercaya terlibat dalam kegiatan, atau pengangkutan barang yang dilarang oleh resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini serta melarang warga negaranya atau orang yang tunduk pada yurisdiksinya atau entitas yang tergabung dalam wilayahnya untuk tidak menyediakan layanan klasifikasi untuk kapal tersebut kecuali sebagaimana yang disetujui sebelumnya oleh Komite berdasar kasus per kasus dan selanjutnya memutuskan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa tidak akan mendaftarkan kapal tersebut kecuali telah disetujui oleh Komite;

13). Menyatakan kekhawatiran bahwa kapal yang memakai bendera Korea Utara dikontrol, disewa atau dioperasikan dengan sengaja mengabaikan persyaratan untuk mengoperasikan sistem identifikasi otomatis (AIS) mereka untuk menghindari pengawasan sanksi UNSCR dengan mematikan sistem tersebut. Selain untuk menghindari pengawasan dari UNSCR, Korea Utara mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) untuk menutup sejarah atau riwayat pergerakan mereka. Kepada semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk melakukan peningkatan kewaspadaan terkait dengan kapal yang melakukan kegiatan yang dilarang oleh resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini;

14). Berdasarkan paragraf 30 dari resolusi 2321 tahun 2016 , memutuskan bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus mencegah pasokan, penjualan atau transfer baik secara langsung maupun tidak langsung ke Korea Utara melalui wilayah mereka atau oleh warga negara mereka atau menggunakan transportasi seperti kapal, pesawat dan lainnya kecuali sebagaimana yang telah disetujui sebelumnya oleh Komite berdasarkan kasus per kasus;

15). Memutuskan bahwa apabila ada suatu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki informasi mengenai jumlah nama dan daftar kapal yang ditemui di wilayahnya atau lepas landas yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan atau Komite sebagai subjek pembekuan aset maka harus memberi tahu Komite tentang informasi ini dan tindakan apa yang diambil untuk melakukan inspeksi, pembekuan dan penghentian asset atau tindakan lain yang sesuai sebagaimana oleh ketentuan yang relevan dari resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini;

16). Memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan resolusi ini tidak akan berlaku sehubungan dengan pengiriman batu bara asal Rusia ke negara-negara lain melalui proyek pelabuhan dan kereta api Rusia – Khasan Korea Utara, sebagaimana diizinkan oleh paragraf 8 resolusi 2371 tahun 2017 dan resolusi 2375 tahun 2017;

17). Memutuskan bahwa negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) wajib melaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam waktu 90 hari sejak resolusi ini diadopsi, dan setelah itu atas permintaan Komite mengenai langkah-langkah konkret yang digunakan untuk mengimplementasikan secara efektif ketentuan-ketentuan pada resolusi ini maka meminta panel, para ahli untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok pemantau sanksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) lainnya untuk membantu semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar mempersiapkan dan menyerahkan laporan tersebut tepat waktu;

18). Menyerukan kepada semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk melipatgandakan upaya dalam menerapkan langkah-langkah penuh sesuai pada resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini dan untuk saling bekerja sama dalam melakukan hal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan inspeksi, deteksi dan barang-barang yang pengirimannya dilarang oleh resolusi-resolusi ini;

19). Memutuskan bahwa mandat Komite sebagaimana yang diatur pada paragraf 12 resolusi 1718 tahun 2006 akan berlaku sehubungan dengan langkah-langkah yang diberlakukan dalam resolusi ini dan selanjutnya ditentukan dalam paragraf 26 resolusi 1874 tahun 2009 dan dimodifikasi dalam paragraph 1 resolusi 2345 tahun 2017 dan juga akan berlaku sehubungan dengan langkah-langkah yang diberlakukan pada resolusi ini;

20). Memutuskan untuk mengizinkan semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyita dan membuang (seperti melalui penghancuran, merusak, menyimpan, dan mengirim ke negara lain atau negara asal dengan tujuan dibuang) semua barang-barang penjualan, transfer, atau ekspor yang dilarang oleh resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini;

21). Menekankan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) termasuk Korea Utara tentang pentingnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa tidak ada klaim mengenai Korea Utara sebagaimana yang sudah ditentukan pada resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini;

22). Menekankan bahwa langkah-langkah yang ditetapkan dalam resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini tidak akan menghalangi kegiatan misi diplomatik atau konsuler di Korea Utara sesuai dengan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan konsuler;

23). Menekankan kembali kepedulian yang mendalam atas kesulitan besar yang harus dihadapi rakyat Korea Utara dan mengutuk Korea Utara karena mengejar senjata nuklir dan rudal balistik daripada mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu menuntut agar Korea Utara berhenti mengalihkan sumber dayanya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik;

24). Menyesalkan pengalihan besar-besaran yang dilakukan Korea Utara atas sumber dayanya ke arah pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik yang

mahal. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menemukan bahwa sejumlah besar wanita hamil dan menyusui, serta anak balita kekurangan gizi akibat pengembangan nuklir tersebut;

25). Menegaskan kembali bahwa langkah-langkah yang dikenakan oleh resolusi 1718 tahun 2006, resolusi 1874 tahun 2009, resolusi 2087 tahun 2013, resolusi 2094 tahun 2013, resolusi 2270 tahun 2016, resolusi 2321 tahun 2016, resolusi 2356 tahun 2017, resolusi 2371 tahun 2017, resolusi 2375 tahun 2017 dan resolusi ini tidak dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi yang merugikan bagi penduduk sipil Korea Utara;

26). Menegaskan kembali dukungannya untuk melakukan perundingan enam pihak yang berisi Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Rusia dengan tujuan mengenai denulikrisasi di Semenanjung Korea;

27). Mengulangi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan Asia Timur secara luas dan menyatakan komitmennya untuk solusi damai, diplomatik dan politik untuk situasi ini;

28). Menegaskan bahwa akan menjaga tindakan Korea Utara dan meninjau secara terus menerus untuk memperkuat, memodifikasi, menanggihkan atau mengangkat langkah-langkah yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan Korea Utara. Menyatakan tekadnya untuk mengambil langkah lebih lanjut dan signifikan mengenai uji coba nuklir dan rudal balistik tersebut dengan mengambil tindakan untuk membatasi ekspor minyak bumi lebih lanjut ke Korea Utara;

29). Memutuskan untuk tetap menguasai masalah ini.

3.3 Respon Rusia dan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2397

(1). Respon Rusia

Pada saat pertemuan mengenai pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2397, Rusia yang diwakili oleh Vladimir

K. Safronkov menyatakan penolakannya secara terang-terangan dan meminta para pemangku kepentingan untuk melakukan dialog damai secara terbuka (United Nations, 2017). Rusia juga mengutuk program nuklir Korea Utara namun berupaya mencapai deknuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan negoisasi. Rusia beranggapan bahwa dengan mengisolasi Korea Utara tidak akan membantu menyelesaikan masalah (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2016).

Penolakan Rusia lantas tidak membuat Dewan Keamanan membatalkan pengadopsian resolusi tersebut karena mayoritas yang hadir lebih memilih sanksi untuk menindaklanjuti Korea Utara. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 2017 dikeluarkanlah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2397 yang berisi sanksi terhadap Korea Utara mengenai uji nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukannya. Lebih rincinya resolusi tersebut berisi mengenai embargo perdagangan, embargo persenjataan, pembatasan pengiriman barang, sanksi finansial, sanksi diplomatik dan memperketat sanksi kemampuan Korea Utara untuk mengirim warga negaranya bekerja di luar negeri (Security Council of United Nations, 2017).

Setelah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2397 dikeluarkan ternyata Rusia diam-diam masih tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara. Menurut data yang diperoleh *Wall Street Journal*, pada tahun 2018 Kementerian Tenaga Kerja Rusia mengeluarkan sekitar 700 izin kerja baru bagi warga Korea Utara (Hasugian, 2018). Pada bulan Februari dan bulan Juli 2018 sebuah perusahaan yang mempekerjakan warga Korea Utara di Rusia yaitu perusahaan Zenco-39 yang berbasis di Krasnodar membuka dan memposting iklan lowongan pekerjaan sebagai penerjemah (Talley dan Kurmanaev, 2018). Perusahaan tersebut diberi izin oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mengiklankan lowongan pekerjaan itu di situs web kerja Rusia. Selain itu seorang direktur perusahaan konstruksi yaitu Soyuz Stroi mengatakan bahwa perusahaannya pada tahun 2018 juga masih merekrut pekerja dari Korea Utara. Media Rusia juga melaporkan bahwa Vladimir Putin memerintahkan

Kementerian Tenaga Kerja untuk memperpanjang izin kerja bagi 3.200 pekerja Korea Utara hingga tanggal 22 Desember 2019 atau ambang maksimal pemulangan warga Korea Utara yang ada di luar negeri berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2397 (Arterburn, 2018).

Seorang duta besar Rusia untuk Korea Utara yaitu Alexander Matsegora menyangkal dan membantah tuduhan bahwa Rusia masih mengeluarkan izin kerja baru bagi warga Korea Utara untuk memasuki Rusia (Nichols and Wroughton, 2018). Ia mengatakan bahwa setiap izin kerja baru yang dikeluarkan adalah untuk para pekerja Korea Utara yang sudah berada di Rusia dan bekerja dibawah kontrak lama (Balmforth, 2018). Kantor berita Interfax juga melaporkan bahwa para pekerja Korea Utara diizinkan untuk bekerja di Rusia hingga tanggal 29 November 2019 karena kontrak mereka ditandatangani sebelum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2397 dikeluarkan.

Duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nikki Haley mengatakan bahwa data yang diunggah oleh *Wall Street Journal* merupakan laporan yang kredibel. Ia juga menambahkan bahwa ketidakpatuhan Rusia akan Resolusi Dewan Keamanan tersebut sangat meresahkan. Rusia tidak mematuhi resolusi tersebut dengan masih menerbitkan izin kerja baru dan tidak segera memulangkan warga Korea Utara sesuai yang telah tertulis di resolusi pada paragraf ke-8 bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dilarang menerbitkan surat izin kerja baru bagi pekerja dari Korea Utara dan apabila ada warga negara Korea Utara yang bekerja di negaranya harus dipulangkan maksimal atau paling akhir 24 bulan sejak dikeluarkannya resolusi tersebut yakni tepatnya pada akhir 2019 (Nichols, 2018).

Sejak awal perundingan resolusi tersebut, Rusia sudah tidak menyetujui dan mengatakan bahwa sanksi bukan solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Korea Utara (Burrows, 2018). Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2018 dilaksanakan pertemuan antara perwakilan dari

Cina, Korea Utara dan Rusia di Moskow. Rusia diwakili oleh Igor Morgulov, Kong Xuanyou dari Cina dan Choe Son Hui dari Korea Utara. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah bahwa situasi di Semenanjung Korea akan diselesaikan sesuai dengan peta jalan (*road map*) Rusia- Cina (Kuo, 2018). Pada akhir tahun 2018, Rusia mengumpulkan laporan kepada Komite Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Laporan tersebut mengatakan bahwa jumlah pekerja Korea Utara dengan izin yang sah menurun dari 30.023 ke 11.490. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengharapkan Rusia untuk mengusir semua pekerja dari Korea Utara yang ada di negaranya pada akhir tahun 2019 seperti yang resolusi tersebut nyatakan lalu Alexander Matsegora menyatakan bahwa hal-hal yang sudah dijelaskan diatas merupakan bukti kalau Rusia juga mematuhi resolusi meskipun Rusia juga berusaha untuk melonggarkan sanksi tersebut (Nichols , 2019).

Menurut media pemerintah Korea Utara ternyata Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara yakni Im Chon Il dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Igor Margulov pada bulan Maret 2019 menandatangani rencana pertukaran dari tahun 2019 hingga tahun 2020 untuk meningkatkan kontak dan hubungan tingkat tinggi diantara kedua negara di bidang politik dan mempromosikan kerja sama di bidang perekonomian dan kemanusiaan (Finnegan, 2019). Tindakan ini disinyalir oleh gagalnya tercapai kesepakatan pada saat perundingan Korea Utara dengan Amerika Serikat di Hanoi pada 28 Februari 2019 (CNN Indonesia, 2019). Selain menandatangani pertukaran 2019-2020, Rusia menerima ajakan Korea Utara untuk mengadakan pertemuan. Akhirnya kedua negara mengadakan pertemuan di Vladivostok pada 25 April 2019. Kim Jong Un berupaya untuk mempertahankan kondisi negaranya yang sedang kritis karena masih ingin mempertahankan senjata nuklir dan menginginkan pelonggaran terhadap tekanan ekonominya. Selain itu, Rusia merupakan salah satu negara penerima ribuan buruh dari Korea Utara yang mana menyumbang sumber uang tunai yang banyak bagi Korea Utara sehingga meminta tolong kepada Rusia untuk mempertahankan buruhnya yang ada di Rusia (Finnegan, 2019). Selesai pertemuan tersebut, *Reuters* melansir perkataan Putin

kepada media bahwa denuklirisasi di Semenanjung Korea bisa dicapai melalui hukum internasional dan Korea Utara membutuhkan jaminan akan hal itu (Christiastuti, 2019).

(2). Respon Korea Utara

Menanggapi pengadopsian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 2397, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat merasa getir dan takut atas kekuatan nuklir negaranya sehingga membuat Amerika Serikat semakin menggila dan menjatuhkan sanksi-sanksi yang keras dan berat (Haryono, 2017). Sanksi yang ditujukan Amerika Serikat kepada Korea Utara adalah untuk menghentikan segala pemasukan bagi Korea Utara agar tidak bisa mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistiknya (Security Council of United Nations, 2017: 4). Korea Utara menyebut sanksi tersebut sebagai tindakan perang terhadap negaranya (Burrows, 2018). Pengadopsian resolusi tersebut berhasil menyebabkan ketegangan dunia internasional.

Beberapa bulan setelah pengadopsian resolusi terhadap Korea Utara membuat Kim Jong Un bersedih karena tidak mampu meningkatkan perekonomian negaranya yang kian terpojok oleh berbagai sanksi internasional (Kumparan.com, 2018). Hal tersebut dimanfaatkan oleh Moon Jae In selaku presiden Korea Selatan untuk memulai pembicaraan dengan Korea Utara. Korea Utara yang kala itu tengah tertekan dengan pemblokadean penuh terhadap perekonomiannya akhirnya menyetujui untuk melakukan pertemuan setelah tujuh dekade putus hubungan dengan Korea Selatan (Burrows, 2018). Pada tanggal 27 April 2018 merupakan pertama kali kedua negara melakukan pertemuan di Panmunjom. Poin penting dari pertemuan antara kedua negara ini adalah meningkatkan perdamaian diantara kedua belah pihak, kedua membahas denuklirisasi dan bersepakat untuk menciptakan Semenanjung Korea yang bebas nuklir, ketiga adalah kerja sama ekonomi (Yulianingsih, 2018). Pertemuan

tersebut adalah salah satu cara Korea Selatan untuk membujuk Korea Utara agar mau berunding dan mulai mengambil kebijakan denuklirisasi (Berty, 2019).

Selain pertemuan dengan Korea Selatan ternyata Korea Utara juga mengadakan pertemuan dengan Amerika Serikat. Setelah percekocokan diantara kedua negara akhirnya pada tanggal 12 Juni 2018 kedua negara melakukan pertemuan di Pulau Sentosa, Singapura (BBC Indonesia, 2018). Pertemuan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat ini menghasilkan suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan kedua negara untuk mengakhiri perseteruan dan denuklirisasi. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesepakatan itu, Korea Utara menutup salah satu situs uji coba nuklir terbesar mereka. Setelah pertemuan di Singapura, kedua negara merasa bahwa pertemuan tersebut masih tidak menjelaskan secara rinci mengenai denuklirisasi karena Amerika Serikat dan Korea Utara diduga berselisih paham mengenai proses menuju denuklirisasi. Perselisihan paham tersebut membuat kedua negara menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam pada tanggal 28 Februari 2019. Pada pertemuan kedua diantara kedua negara ini, Korea Utara mengatakan bahwa denuklirisasi tidak bisa berjalan beriringan dengan sanksi. Korea Utara menginginkan semua sanksi terhadap negaranya dicabut. Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak bisa meluluskan permintaan tersebut. Ia ingin melihat denuklirisasi sepenuhnya dari Korea Utara dan akan mencabut sanksi satu persatu. Pada pertemuan kali ini tidak ditemukan satu titik kesepakatan sehingga pertemuan mengalami jalan buntu (CNN Indonesia, 2019)

Satu setengah bulan setelah pertemuan antara Kim Jong Un dan Donald Trump di Hanoi tidak mencapai kesepakatan, Kim Jong Un berencana untuk menemui Presiden Rusia yakni Vladimir Putin untuk pertama kalinya. Kim Jong Un berupaya untuk mempertahankan kondisi negaranya yang sedang kritis karena masih ingin mempertahankan senjata nuklir dan menginginkan pelonggaran terhadap tekanan ekonominya. Selain itu, Rusia merupakan salah satu negara penerima ribuan buruh dari Korea Utara yang mana menyumbang sumber uang tunai yang banyak bagi Korea Utara sehingga meminta tolong kepada Rusia untuk

mempertahankan buruhnya yang ada di Rusia. Akhirnya pada tanggal 25 April 2019 kedua negara melakukan pertemuan yang berhelat di Vladivostok, Rusia (Finnegan, 2019). Selesai pertemuan tersebut, *Reuters* melansir perkataan Putin kepada media bahwa denuklirisasi di Semenanjung Korea bisa dicapai melalui hukum internasional dan Korea Utara membutuhkan jaminan akan hal itu (Christiastuti, 2019).



BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan sejarahnya, pengiriman dan penerimaan tenaga kerja Korea di Rusia dimulai sejak akhir 1940-an di bawah perjanjian antar pemerintahan. Hubungan tersebut mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun sampai akhirnya pada tahun 2017 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 2397 yang berisi beberapa poin salah satunya mengenai sanksi untuk memperketat kemampuan Korea Utara dalam rangka mengirim warga negaranya bekerja di luar negeri. Di dalam resolusi tersebut tertulis bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus memulangkan semua warga negara Korea Utara yang ada di negaranya dengan batas waktu paling akhir 24 bulan sejak diadopsinya resolusi tersebut yakni pada Desember 2019 dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga dilarang menerbitkan surat izin kerja baru bagi para tenaga kerja dari Korea Utara. Pasca dikeluarkannya resolusi tersebut, pada tahun 2018 Rusia masih tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara dengan mengeluarkan 700 surat izin kerja baru. Melalui pendekatan kerja sama bilateral, teori fungsionalisme, kebijakan kependudukan dan konsep ketenagakerjaan, diperoleh 2 alasan mengapa Rusia tetap mempekerjakan tenaga kerja dari Korea Utara meskipun ada sanksi berupa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017.

Pertama karena berdasarkan ikatan persahabatan yang dijalin oleh Rusia dan Korea Utara. Rusia adalah tetangga Korea Utara, mereka terikat oleh persahabatan dan harus saling membantu satu sama lain apabila salah satu negara mengalami kesulitan. Kedua, karena Rusia mengalami permasalahan penurunan populasi yang sangat dramatis sehingga membutuhkan para tenaga kerja asing khususnya pekerja dari Korea Utara.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adioetomo, S. dan O. B. Samosir. 2010. *Dasar- Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asrudin. dan M. J. Suryono 2009. *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bakry, U. S. 2017. *Dasar Dasar Hubungan Internasional*. Depok: PT Desindo Putra Mandiri.
- Bouchkin, A. A. 1999. *North Korea and Russia*. Seoul: The Sejong Institute.
- Coulombis, T. A. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power*. Jakarta: Putra Abardin.
- Gerungan, W. 2002. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Henderson, J. dan T. Mitrova . (2016). *Energy Relations between Russia and China: Playing Chess with the Dragon*. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies.
- Holsti, K. 1988. *Politik Internasional Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Kartasasmita, K. 1977. *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Keohane, R. O. 2006. Cooperation and International Regimes. Dalam R. & Little, *Perspective on World Politics*. London: Routledge.
- Korea Energy Economics Institute. 2018. *Year book of Energy Statistics*. Ulsan: Korea Energy Economics Institute.
- Moleong, J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Perwira, A. dan Y. M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qudsi, S. Z. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Rachmawati, I. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rana, K. S. 2002. *Bilateral Diplomacy*. New Delhi: Manas Publications.

Seung Ho, J. 2000. *Gorbachev's Foreign Policy Toward the Korean Peninsula, 1985-1991 Power and Reform*. New York: Mellen Press.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Volkogonov, D. 1999. *Autopsy For An Empire: The Seven Leaders Who Built the Soviet Regime* . New York: Free Press.

Jurnal

Ashford, L. S. 2001. New Population Policies: Advancing Women's Health and Rights. *Population Bulletin*, Vol. 56, No. 1.

Bainus, Arry. Dan Rachman. J. B. 2018. Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol.2, No.2.

Darman. dan Afiat. 2016. Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi*, Vol.1, No.1.

Eremina, A. dan C.H. Shon. 2010. A Cost Benefit Analysis of Routes Between the Trans-Korean and Trans-Siberian Railways. *Journal Of International Logistics and Trade*, Vol. 8, No.2.

Gyupchanova, T. (2018). The Case of Russia. Labor and Human Rights Conditions of North Korean Workers Dispatched Overseas: A Look at the DPRK's Exploitative Practices in Russia, Poland, and Mongolia. *Cornell International Law Journal* , Vol. 51, No. 1.

Heo, U. dan J.Y. Woo 2008. The North Korean Nuclear Crisis: Motive, Progress, and Prospect. Vol.39, No.4.

Ho Joo, S. 2001. The New Friendship Treaty between Moscow and Pyongyang. *Comparative Strategy*, Vol.20, No.5.

Meyer, P. M. 2005. Russia's Interests and Objectives on the Korean Peninsula . *International Journal of Korean Studies*, Vol.9, No.2.

Zabrovskaya, L. 2006. Economic Contacts between the DPRK and the Russian Far East: 1992-2005. *International Journal of Korean Unification Studies*. Vol.15, No.2.

Laporan

Human Rights Council of United Nations. 2017. *The Situation of Human Rights in The Democratic People's Republic of Korea*. New York: United Nations.

Ministri of Energy of the Russian Federation. 2010. *Energy Strategy of Russia for the Period Up to 2030*. Moscow: Institute of Energy.

Security Council of United Nations. 2017. *Resolution 2397*. New York: United Nations.

United Nations. 2015. *Situation of Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea*. New York: United Nation.

Surat Kabar

Koran Kompas. 2019. *Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara*. Jakarta. 3 Maret.

Internet

Ariefyanto, M. 2013. Hari Ini di 1948 Negara Korea Utara Dideklarasikan. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/05/01/mm4cio-hari-ini-di-1948-negara-korea-utara-dideklarasikan> [Diakses pada 14 Juni 2019].

Arterburn, J. 2018. DISPATCHED: Mapping Overseas Forced Labor in North Korea's Proliferation Finance System. <https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=c978f6580e304a698e52c9f6271906b0&classicembedmode> [Diakses pada 17 Agustus 2019].

Balmforth, T. 2017. Another Worrying Sign For Russia's Dire Demographics. <https://www.rferl.org/a/russia-population-decline-labor-oreshkin/28760413.html> [Diakses pada 17 Juli 2019].

-----, 2018. Russia denies violating U.N. restriction on North Korean laborers: Ifax. <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-russia-diplomacy/russia-denies-violating-u-n-restriction-on-north-korean-laborers-ifax-idUSKBN1KO1IW> [Diakses pada 17 Juli 2019].

BBC Indonesia. 2018. Kim-Trump tandatangani 'kesepakatan': Hubungan AS-Korut akan berbeda sama sekali. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44447915>. [Diakses pada 19 Juli 2019].

Berty, T. T. 2019. Korsel Berencana Peringati Setahun Pertemuan Moon Jae-in dan Kim Jong-un. <https://www.liputan6.com/global/read/3947806/korsel-berencana-peringati-setahun-pertemuan-moon-jae-in-dan-kim-jong-un>

[un?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](#) [Diakses pada 19 Juli 2019].

BSI Group. 2017. North Korean Forced Labor. <https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/es-mx/supply-chain-solutions/north-korean-forced-labor-1711.pdf> [Diakse pada 16 Oktober 2019].

Burrows, E. dan M. Chance. 2018. Russia's hidden world of North Korean labor. <https://edition.cnn.com/2018/01/15/europe/russia-north-korea-labor-intl/index.html> [Diakses pada 17 Juli 2019].

Christiastuti, N. 2019. Pertemuan Putin dan Kim Jong-Un Berlangsung 3,5 Jam, Ini yang Dibahas. <https://news.detik.com/internasional/d-4524990/pertemuan-putin-dan-kim-jong-un-berlangsung-35-jam-ini-yang-dibahas> [Diakses pada 19 Juli 2019].

CNN Indonesia. 2018. Menilik Sejarah Terbentuknya Korea Utara. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180611095318-113-305134/menilik-sejarah-terbentuknya-korea-utara> [Diakses pada 11 Juni 2019].

-----, 2018. Rusia Terima Ribuan Pekerja Korea Utara. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180803120357-113-319182/rusia-terima-ribuan-pekerja-korea-utara> [Diakses pada 5 Februari 2019].

-----, 2019. Jalan Panjang Trump dan Kim Jong-un dari Singapura ke Vietnam. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190227214148-106-373275/jalan-panjang-trump-dan-kim-jong-un-dari-singapura-ke-vietnam> [Diakses pada 19 Juli 2019].

Denisenko, M. dan Varshavskaya, Y. 2013. Migrants at the Russian Labour Market: Characteristics, Status, Mobility. <http://www.ub.edu/searxhproject/wp-content/uploads/2013/07/WP321.pdf> [Diakses pada 16 Oktober 2019].

Finnegan, C. 2019. Minta Bantuan Rusia, Kim Jong-un Temui Vladimir Putin. <https://www.matamatapolitik.com/news-minta-bantuan-rusia-kim-jong-un-temui-vladimir-putin/> [Diakses pada 4 Juli 2019].

FRED Economic Data. 2019. Active Population: Aged 15-74: All Persons for the Russian Federation.

- <https://fred.stlouisfed.org/series/LFAC74TTRUQ647S> [Diakses Pada 26 Oktober 2019].
- Galushka, A. 2016. Russian-North Korean relations head for a new level and a breakthrough in trade. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=1905 [Diakses pada 29 Juni 2019].
- Haggard, S. dan M. Noland. 2007. North Korea's External Economic Relations. <https://www.piie.com/publications/working-papers/north-koreas-external-economic-relations> [Diakses pada 25 Juli 2019].
- Handoko, E. 2016. Rusia Peringati 100 Tahun Jalur Kereta Api Trans-Siberia. <https://internasional.kompas.com/read/2016/10/05/08382351/rusia.peringati.100.tahun.jalur.kereta.api.trans-siberia?page=2> [Diakses pada 29 Juli 2019].
- Haryono, W. 2017. DK PBB Berikan Sanksi Baru, Korut: Ini Aksi Perang. <https://mediaindonesia.com/read/detail/137822-dk-pbb-berikan-sanksi-baru-korut-ini-aksi-perang> [Diakses pada 19 Juli 2019].
- Hasan, R. A. 2018. Pakar: Nuklir Korea Utara Bukan untuk Menghancurkan AS, Tapi... <https://www.liputan6.com/global/read/3235137/pakar-nuklir-korea-utara-bukan-untuk-menghancurkan-as-tapi> [Diakses pada 5 Juli 2019].
- Hasugian, M. R. 2018. Cuek Sanksi PBB, Rusia Buka Pintu Bagi Ribuan Pekerja Korea Utara. <https://dunia.tempo.co/read/1113544/cuek-sanksi-pbb-rusia-buka-pintu-bagi-ribuan-pekerja-korea-utara> [Diakses pada 16 Juli 2019].
- Ho Joo, S. dan T.H Kwak. 2001. *MILITARY RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND NORTH KOREA*. https://www.jstor.org/stable/23255911?read-now=1&seq=3#metadata_info_tab_contents [Diakses pada 7 Agustus 2019].
- Human Rights Watch. 2018. Tanya Jawab: Korea Utara, Sanksi, dan Hak Asasi Manusia. <https://www.hrw.org/id/news/2018/05/30/318916> [Diakses pada 4 Februari 2019].
- Hyung, K. T. 2019. Russian-North Korean relations since the Korean War. <https://www.apnews.com/24932ed50a424a12a243cc1434c71b49> [Diakses pada 1 September 2019].
- International Crisis Group. 2007. North Korea-Russia Relations: A Strained Friendship. <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/korean-peninsula/north-korea-russia-relations-strained-friendship> [Diakses pada 28 Juli 2019].

- International Labour Organization. 2006. Russia Needs Migrant Workers to Support Economic Growth. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_071244/lang--en/index.htm [Diakses pada 24 Oktober 2019]
- , 2006. Russia Needs One Million Migrant Workers. https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_481926/lang--en/index.htm [Diakses pada 25 Oktober 2019].
- Kang, K. 2017. President Moon's Special Order, "Open North Korea through the RNS Pipeline. <https://www.mk.co.kr/news/politics/view/2017/05/335425/> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- KBS World Radio. 2016. Tahun 1950 hingga 60-an. http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/outline/outline_1950.htm?lang=i [Diakses pada 14 Juni 2019].
- Kristanti, E. Y. 2017. 25-6-1950: Serangan Kejutan Korut Nyaris Memicu Perang Dunia III. <https://www.liputan6.com/global/read/3002037/25-6-1950-serangan-kejutan-korut-nyaris-memicu-perang-dunia-iii> [Diakses pada 11 Juni 2019].
- Kumparan.com. 2018. Kim Jong-un Menangis, Tak Mampu Perbaiki Perekonomian Korut. <https://kumparan.com/@kumparannews/kim-jong-un-menangis-tak-mampu-perbaiki-perekonomian-korut> [Diakses pada 19 Juli 2019].
- Kuo, M. 2018. China, Russia, and US Sanctions on North Korea. <https://thediplomat.com/2018/11/china-russia-and-us-sanctions-on-north-korea/> [Diakses pada 17 Juli 2019].
- Lankov, A. 2017. A brief history of North Korean laborers in Russia. <https://www.nknews.org/2017/06/abrief-history-of-north-korean-laborers-in-russia/> [Diakses pada 4 Juli 2019].
- , 2018. Negara yang Tak Ada?: Bagaimana Pyongyang Membuat Uni Soviet Melupakan Korea Selatan?. <https://id.rbth.com/sejarah/79987-hubungan-soviet-korea-selatan-fyx> [Diakses pada 24 Juni 2019].
- Lankov, A. 2018. North Korean workers and their Russian employers: observations from Vladivostok. <https://www.nknews.org/2018/11/north-korean-workers-and-their-russian-employers-observations-from-vladivostok/> [Diakses pada 17 Agustus 2019].

- Lee, Y. 2019. Political Viability of the Russia-North Korea-South Korea Gas Pipeline Project: An Analysis of the Role of the U.S. <https://www.mdpi.com/1996-1073/12/10/1895/pdf> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Lobanova, E. 2017. Rusia: Negara Kaya atau Miskin?. https://id.rbth.com/discover_russia/2017/02/20/sebenarnya-rusia-itu-kaya-atau-miskin_qyx706203 [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Lukin, A. Dan L. Zakharova. 2017. Russia-North Korea Economic Ties: is There More Than Meets the Eye?. <https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2017/10/Russia-DPRK-Economics.pdf> [Diakses pada 26 Juni 2019].
- Mahardika, W. A. 2018. Duo Korea Ingin Rusia Garap Proyek Kereta Api Mereka. <https://akurat.co/ekonomi/id-314641-read-duo-korea-ingin-rusia-garap-proyek-kereta-api-mereka> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Manuylova, A. 2019. Russia needs workers. Its migration system is keeping them out. <https://eurasianet.org/russia-needs-workers-its-migration-system-is-keeping-them-out> [Diakses pada 14 Agustus 2019].
- Napalkova, A. 2019. The secret world of Russia's North Korean workers. <https://www.bbc.com/news/world-europe-43802085> [Diakses pada 29 Juli 2019].
- Nichols, dan L. Wroughton. 2018. U.S. envoy to U.N. accuses Russia of violating North Korea sanctions. <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-russia/russia-allows-entry-of-thousands-of-north-korean-workers-wsj-idUSKBN1KO076> [Diakses pada 17 Juli 2019].
- Nichols, M. 2019. Russia, China sent home more than half of North Korean workers in 2018 - UN reports. <https://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-sanctions-un/russia-china-sent-home-more-than-half-of-north-korean-workers-in-2018-un-reports-idUKKCN1RA2E1> [Diakses pada 17 Juli 2019].
- Nurchahyo, N. 2018. Korsel Ingin Terhubung dengan Rusia melalui Rel Kereta yang Melintasi Korut. <https://news.harianjogja.com/read/2018/06/20/500/923326/korsel-ingin-terhubung-dengan-rusia-melalui-rel-kereta-yang-melintasi-korut> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Pradana, S. 2019. 7 Fakta Mengerikan tentang Gulag, Kamp Konsentrasi Warisan Uni Soviet. <https://www.idntimes.com/science/discovery/shandy-pradana/fakta-gulag-uni-soviet-exp-c1c2/full> [Diakses pada 22 Oktober 2019].

- Pratama, A. 2018. Hari Ini dalam Sejarah: Jepang Menyerah dan Perang Dunia II Berakhir.
<https://internasional.kompas.com/read/2018/08/14/11071931/hari-ini-dalam-sejarah-jepang-menyerah-dan-perang-dunia-ii-berakhir?page=all>
[Diakses pada 14 Juni 2019].
- Purnama, C. L. 2018. Dua Korea Sepakat Memodernisasi Jalur Kereta Api.
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/06/26/paxrnz349-dua-korea-sepakat-memodernisasi-jalur-kereta-api> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Ragozin, L. 2017. Russia Wants Immigrants the World Doesn't.
<https://www.bloomberg.com/news/features/2017-03-14/russia-s-alternative-universe-immigrants-welcome> [Diakses pada 24 Oktober 2019].
- Rasyid, F. A. 2018. Sepanjang 2018, Populasi Rusia Berkurang 86,7 Ribu.
<https://id.rbth.com/discover-russia/81143-populasi-rusia-2018-menurun-wyx> [Diakses pada 14 Agustus 2019]
- Reuters. 2014. Russia writes off 90 percent of North Korea debt, eyes gas pipeline.
<https://uk.reuters.com/article/russia-northkorea-debt/russia-writes-off-90-percent-of-north-korea-debt-eyes-gas-pipeline-idUKL6N0NB04L20140419> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Rosenberg, M. 2019. Population Decline in Russia.
<https://www.thoughtco.com/population-decline-in-russia-1435266>
[Diakses pada 14 Agustus 2019].
- Shim, E. 2019. Russia to repatriate all North Korea laborers, official says.
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2019/02/07/Russia-to-repatriate-all-North-Korea-laborers-official-says/4981549552196/?ur3=1
[Diakses pada 16 Juli 2019].
- Sputnik International. 2018. Trans-Korea Gas Pipeline Project With Russia May Be Revived - Seoul.
<https://sputniknews.com/asia/201803301063071305-trans-korea-gas-project-russia-revived/> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Talley, I. dan A. Kurmanaev. 2018. Thousands of North Korean Workers Enter Russia Despite U.N Ban.
<https://www.wsj.com/articles/russia-is-issuing-north-korean-work-permits-despite-u-n-ban-1533216752> [Diakses pada 17 Februari 2019].
- TASS Russian News Agency. 2019. Russian-North Korean trade turnover drops by half in 2018 due to sanctions .
<https://tass.com/economy/105519>
[Diakses pada 4 Juli 2019].

- Tempo.co. 2011. Kim Jong Il dan Sejarah Korea Utara.
<https://dunia.tempo.co/read/372526/kim-jong-il-dan-sejarah-korea-utara/full&view=ok> [Diakses pada 14 Juni 2019].
- . 2017. Cara Korea Utara Kumpul Uang- di Mongolia, Mereka Tak Terima Gaji . <https://dunia.tempo.co/read/869404/cara-korea-utara-kumpul-uang-di-mongolia-mereka-tak-terima-gaji> [Diakses pada 18 Mei 2019].
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2016. Sergey Lavrov's remarks and answers to media questions at a news conference on Russia's diplomacy performance in 2015.
https://embrusscambodia.mid.ru/web/cambodia-en/news/-/asset_publisher/XnFvEje3IKoj/content/sergey-lavrov-s-remarks-and-answers-to-media-questions-at-a-news-conference-on-russia-s-diplomacy-performance-in-2015-moscow-january-26-2016?inheritRedirect=false [Diakses pada 16 Juli 2019].
- The Moscow Times. 2019. Russia's FSB Publishes Foreign Worker Statistics For First Time in 20 Years.
<https://www.themoscowtimes.com/2019/08/16/russias-fsb-publishes-foreign-worker-statistics-for-first-time-in-20-years-a66895> [Diakses pada 24 Oktober 2019].
- The Straits Time. (2018, September 18). US, Russia clash at UN over North Korea sanctions. <https://www.straitstimes.com/world/us-russia-clash-at-un-over-north-korea-sanctions> [Diakses pada 27 Februari 2019].
- Timofeichev, A. 2018. Tiga Penyebab Utama Keruntuhan Uni Soviet.
<https://id.rbth.com/sejarah/81058-penyebab-kehancuran-uni-soviet-wyx>. [Diakses pada 24 Juni 2019].
- United Nations. 2017. Security Council Tightens Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2397 (2017). <https://www.un.org/press/en/2017/sc13141.doc.htm> [Diakses pada 15 Juli 2019].
- Volynets, A. 2018. Kenapa Rusia Membangun Jalur Kereta Trans-Siberia?
<https://id.rbth.com/sejarah/79866-sejarah-jalur-trans-siberia-fyx> [Diakses pada 29 Juli 2019].
- Wikivoyage. Trans-Siberian Railway. https://en.wikivoyage.org/wiki/Trans-Siberian_Railway [Diakses pada 31 Juli 2019].
- Worldometers. 2019. Russia Population (LIVE).
<https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/> [Diakses pada 14 Agustus 2019].

- World Population Review. 2019. Russia Population 2019. <http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/> [Diakses pada 4 Agustus 2019].
- Yasinta, V. 2019. Bak Roller Coaster, Begini Kilas Balik Hubungan Rusia dan Korea Utara. <https://internasional.kompas.com/read/2019/04/25/12553101/bak-roller-coaster-begini-kilas-balik-hubungan-rusia-dan-korea-utara?page=all> [Diakses pada 14 Juni 2019].
- Yonhap. 2018. *Transit fees for trans-Korea gas pipeline estimated at over W200b:* KOGAS. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181023000842> [Diakses pada 19 Agustus 2019].
- Yulianingsih, T. 2018. Dunia Sambut Hasil Pertemuan Bersejarah KTT Korea Selatan - Korea Utara. https://www.liputan6.com/global/read/3493088/dunia-sambut-hasil-pertemuan-bersejarah-ktt-korea-selatan-korea-utara?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [Diakses pada 19 Juli 2019].
- Zakharova, L. 2016. Russia-North Korea Ecomic Relations. http://keia.org/sites/default/files/publications/joint_us-korea_2016_-_russia_nk.pdf [Diakses pada 26 Juni 2019].
- Zwirko, C. 2019. North Korea, Russia sign cultural cooperation agreement in Pyongyang: embassy. <https://www.nknews.org/2019/02/north-korea-russia-sign-cultural-cooperation-agreement-in-pyongyang-embassy/> [Diakses pada 11 Agustus 2019.]